

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenaanannya Pemerintah Kota Ambon dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2014, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat sesuai Peraturan yang berlaku. Dalam rangka itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Ambon Tahun 2014 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang didasarkan pada Penetapan Kinerja 2014 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon Tahun 2011-2016, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan *Clean Government* dan *Good Governance*. Hasil pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kota Ambon tidak terlepas dari kerja sama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam Perumusan Kebijakan, Implementasi maupun pengawasannya.

Demikian LAKIP ini kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan terhadap masyarakat.

Ambon, Maret 2015

WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESSY, SH

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kondisi Umum Kota Ambon	7
a. Kondisi Geografis	7
b. Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB	10
1.3 Kewenangan Pemerintah Kota Ambon	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	19
2.2 Visi Misi Kota Ambon	20
2.3 Tujuan dan Sasaran	28
2.4 Prioritas Pembangunan	30
2.5 Indikator Kinerja Daerah 2014	31
2.6 Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	37
3.2 Realisasi Anggaran	70
BAB IV PENUTUP	77
LAMPIRAN	
Capaian dan Penghargaan	
Perjanjian Kinerja Tahun 2015	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, pemerintah Kota Ambon berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil sesuai dengan kewenangannya.

Tahun 2014 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian indikator kinerja utama sesuai Keputusan Walikota Ambon Nomor 144 Tahun 2014 yang telah diubah dan diselaraskan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ambon, sehingga Laporan Kinerja Pemerintah Kota Ambon Tahun 2014 belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan. Pada tahun 2014 ditetapkan 28 sasaran dengan 39 indikator sasaran dan mengacu pada 8 misi dengan rincian sebagai berikut :

Misi pertama terdiri dari, 3 sasaran dan 3 indikator

Misi kedua terdiri dari, 10 sasaran dan 20 indikator

Misi ketiga terdiri dari, 4 sasaran dan 4 indikator

Misi keempat terdiri dari, 2 sasaran dan 2 indikator

Misi kelima terdiri dari, 2 sasaran dan 2 indikator

Misi keenam terdiri dari, 4 sasaran dan 5 indikator

Misi ketujuh terdiri dari, 2 sasaran dan 2 indikator

Misi kedelapan terdiri dari, 1 sasaran dan 1 indikator

Capaian sasaran pada **misi Pertama** terdiri atas 3 indikator kinerja dengan realisasi 3 indikator atau 100% telah mencapai atau melampaui target yang ditetapkan. Capaian **misiKedua**, terdiri atas 20 indikator kinerja dengan realisasi sebanyak 6 indikator kinerja atau 30% dan 70% belum/ tidak tercapai atau sebanyak 14 indikator kinerja, namun rata-rata capaiannya telah mencapai di atas 85%. **MisiKetiga**, berjumlah 4 indikator kinerja dengan persentase pencapaian sasaran sebanyak 4 indikator atau 100%. **MisiKeempat**, terdiri atas 2 indikator kinerja dengan persentase pencapaian

sasaran 0% atau 2 indikator belum mencapai target capaian. **MisiKelima**, berjumlah 2 indikator kinerja dengan presentase pencapaian sasaran sebanyak 0% indikator atau 2 indikator belum mencapai target. **MisiKeenam**, berjumlah 5 indikator kinerja dengan realisasi ketercapaian sebanyak 4 indikator kinerja atau 80% dan 20% belum/tidak tercapai atau sebanyak 1 indikator kinerja. **Misi Ketujuh**, terdiri atas 2 indikator kinerja dengan presentase pencapaian sasaran sebanyak 2 indikator atau 100%. **MisiKedelapan**, terdiri atas 1 indikator kinerja dan 1 indikator belum mencapai target yang ditetapkan. Dan secara keseluruhan dari 8 misi yang ada, di tahun 2014 mencapai hasil 59,12% atau kategori **cukupberhasil**.

Dalam perjalanannya, pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Ambon menghadapi berbagai kendala dan hambatan namun upaya perbaikan terus dilakukan demi tercapainya kinerja pemerintah Kota Ambon yang professional, kredibel, transparan, dan akuntabel.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) merupakan tujuan setiap negara di dunia. Tujuan tersebut menjadi sebuah prasyarat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Indonesia pun demikian, upaya melalui berbagai kebijakan dikeluarkan untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, salah satunya adalah perumusan agenda reformasi birokrasi 2010-2025. Perumusan tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 serta Peraturan MenPAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014 dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Ambon dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Ambon Nomor 46 Tahun 2014 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2015-2019. Dengan demikian, reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perbaikan ke arah yang lebih baik.

Adapun salah satu tujuan dari agenda reformasi birokrasi 2010-2014 adalah menguatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah. Penguatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah merupakan sebuah faktor untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini dikarenakan akuntabilitas kinerja merupakan bentuk kewajiban setiap instansi



pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi

Dalam rangka menilai tanggungjawab pemerintah daerah di Indonesia dalam menyediakan pelayanan umum (*public service*) seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, perlu diukur sejauh mana pemerintah daerah telah memenuhi standard kinerja sebagai daerah otonomi untuk tercapainya pelayanan publik bagi kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan dikeluarkannya peraturan perundangan dalam kaitannya dengan pelaksanaan *Good Governance* dan otonomi daerah tersebut, telah dikembangkan dan diterapkan suatu sistem perencanaan dan pertanggungjawaban yang dinamakan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Kemauan untuk meningkatkan akuntabilitas menuju *Good Governance* diawali dengan lahirnya Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Untuk mendukung produk hukum tersebut, maka Presiden menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang saat ini telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem AKIP pada hakikatnya merupakan sistem manajemen pemerintah yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi penegakan hukum yang berorientasi pada hasil (*Outcomes oriented*) bukan keluaran



semata. Sistem AKIP diimplementasikan secara “ *self assessment*” oleh masing- masing instansi pemerintah maksudnya , instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur dan mengevaluasi Kinerjanya sendiri dan melaporkannya Kepada instansi yang lebih tinggi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kota diminta untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi periodik setiap tahun dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran strategis instansi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah. Berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang



lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat. Bertitik tolak dari RPJMD Kota Ambon Tahun 2011- 2016, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ambon dan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP Tahun 2014 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja dengan demikian, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Walikota kepada Presiden pada tahun ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Tahun 2014 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon Tahun 2011-2016. Tahun 2014 merupakan tahun yang strategis, bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Ambon



dalam menjalankan RPJMD yang telah disusun, sehingga tahun 2016 sebagai akhir RPJMD 2011-2016 dapat dituntaskan dengan baik sebagaimana visi dan misi Pembangunan Kota Ambon. Pelaksanaan penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Ambon Tahun 2014 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang – undangan yang melandasi pelaksanaan LAKIP, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat DPRD Kota Ambon;



8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kota Ambon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kota Ambon
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Ambon;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Kelurahan Kota Ambon ;
12. Peraturan Daerah kota Ambon Nomor 7 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah Kota Ambon;
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon;
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ambon Tahun 2011-2016;



15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon Tipe A;
16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Ambon;
17. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun 2014.

1.2. Kondisi Umum Kota Ambon

a. Kondisi Geografis.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979, luas Kota Ambon adalah 377 Km² atau 2/5 dari luas wilayah pulau Ambon. Berdasarkan hasil survey Tata Guna Tanah Tahun 1980 luas daratan kota Ambon tercatat 359,45 Km² dan lautan seluas 17,55 Km² dengan panjang garis pantai 98 Km. Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2006 wilayah administratif Kota Ambon dimekarkan menjadi 5 kecamatan dari sebelumnya 3 kecamatan, yang membawahi 20 kelurahan dan 30 desa/negeri.

Tabel 1.1 berikut ini memberikan gambaran tentang hasil pemekaran wilayah administrasi Kota Ambon sesuai Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 tahun 2006 tersebut di atas.

Tabel 1.1
Keadaan Wilayah Administrasi
Kota Ambon Hasil Pemekaran



No	Kecamatan	Ibukota	Jumlah Desa/Kelurahan		Luas Wilayah (Km ²)
			Desa/Negeri	Kelurahan	
1	Nusaniwe	Amahusu	5	8	88,35
2	Sirimau	Karang Panjang	4	10	86,82
3	T.A.Baguala	Passo	6	1	40,11
4	Leitimur Selatan	Leahari	8	-	50,50
5	Teluk Ambon	Wayame	7	1	93,67
J u m l a h			30	20	359,45

Sumber data : Bappekot Ambon Tahun 2014

Secara Astronomis, wilayah administrasi Kota Ambon berada antara 3° - 4° Lintang Selatan dan 128 ° - 129 ° Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Petuanan Desa Hitu, Hila dan Kaitetu dari Kecamatan Leihutu Kabupaten Maluku Tengah.

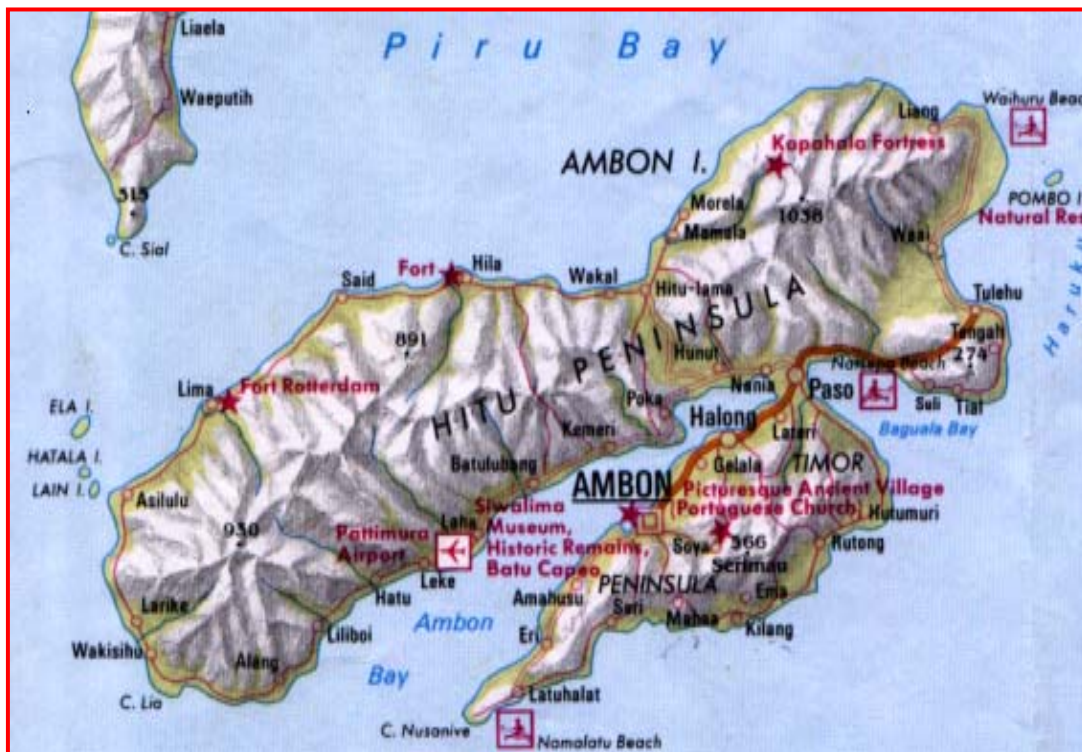
Sebelah Selatan : Laut Banda

Sebelah Timur : Petuanan Desa Suli dari Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

Sebelah Barat : Kabupaten Maluku Tengah.

PETA AMBON


AMBON MAP



SKALA 1 : 500.000



Keterangan/ Legend :

	Kota Ambon		Gunung/ Mountain
	Benteng/ Fort		Bandara/ Air Field
	Jalan Propinsi/ Provincial Road		Batas Kecamatan
	Jalan Raya/ Secondary Road		Sungai/ River
	Rekreasi Pantai/ Beach		

Kota Ambon dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota Provinsi sekaligus berfungsi sebagai pusat aktivitas sosial, ekonomi, pemerintahan serta pendidikan tinggi di Provinsi Maluku, membawa pengaruh pada pertumbuhan penduduk, terkait dengan migrasi, ke Kota Ambon dari daerah-daerah sekitar.

Jumlah penduduk Kota Ambon pada pertengahan tahun 2013 berjumlah 379.615 jiwa jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2012 meningkat sebanyak 4,36 % dengan jumlah penduduk terbanyak terdapat di kecamatan Sirimau dengan kepadatan 1,849 jiwa / Km², sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di kecamatan Leitimur Selatan dengan kepadatan 213 jiwa / Km². Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kota Ambon dari Tahun 2008-2013 dan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2008-2013 dapat dilihat pada tabel 1.2 dan tabel 1.3 di bawah ini

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2008 – 2013

Tahun	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah
2008	141.387	50,26	139.906	49,74	281.293
2009	142.791	50,14	142.018	49,86	284.809
2010	165.926	50,09	165.328	49,91	331.254
2011	167.448	49,19	172.979	50,91	340.427
2012	178.878	50,46	175.586	49,54	354.464
2013	189.728	49,98	189.887	50,02	379.615

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Ambon, (2014 data diolah)



Tabel 1.3
Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Ambon
Tahun 2008 – 2013

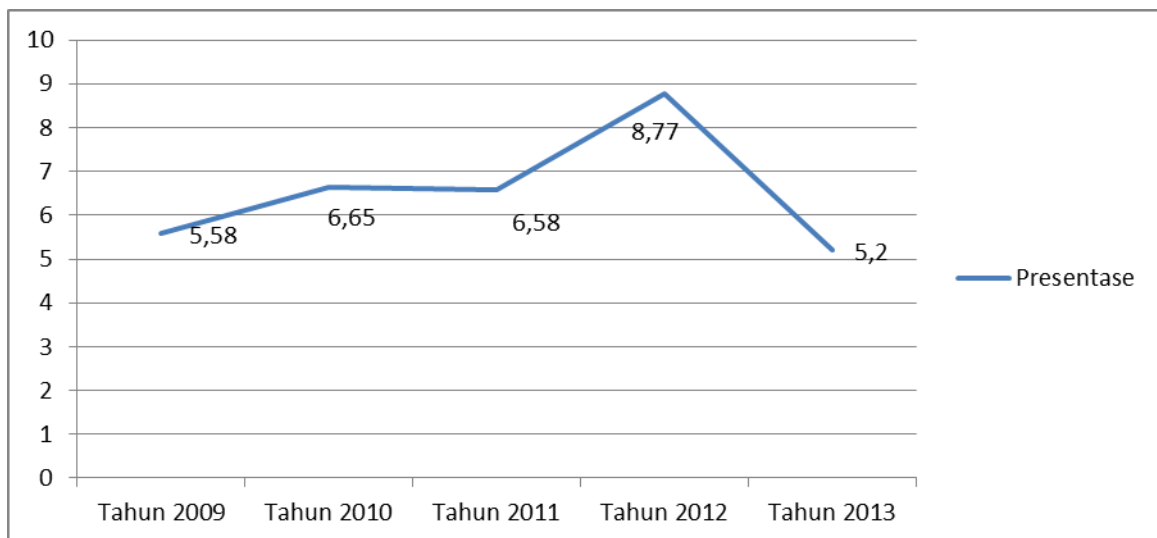
Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan (%)
2009	284.809	1,25
2010	331.254	17,20
2011	340.427	4,44
2012	354.464	4,35
2013	379.615	4,36

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Ambon, (2014 data diolah)

b. Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian dalam suatu wilayah.

Grafik1.1. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Ambon Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Tahun 2009-2013 (%)



Dalam kurun waktu lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kota Ambon selalu positif. Selama tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Kota Ambon tercatat sebesar 5,20 persen, melambat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,77 persen. Pertumbuhan seluruh sektor ekonomi kecuali Sektor Bangunan di Kota Ambon melambat jika dibandingkan



perekonomian pada tahun 2012, sekaligus menjadikan sektor Bangunan sebagai sektor ekonomi dengan pertumbuhan tercepat pada tahun 2013 di Kota Ambon. Sektor Industri dengan besar pertumbuhan 9,18 persen menjadi sektor dengan pertumbuhan tercepat kedua untuk tahun 2013, kemudian berturut-turut Sektor Pertambangan dan Penggalan, Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran serta Sektor Pengangkutan & Komunikasi dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 7,92 persen, 6,57 persen dan 6,03 persen. Sementara Sektor Listrik, Gas & Air Bersih, Sektor Jasa-jasa, Sektor Pertanian dan Sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan adalah sektor-sektor perekonomian dengan pertumbuhan di bawah 5 persen. Seperti telah disebutkan di atas, hanya sektor Bangunan yang pertumbuhannya mengalami percepatan pada tahun 2013. Pembangunan Jembatan Merah Putih masih menjadi alasan utama cepatnya pertumbuhan sektor ini. Namun cepatnya pertumbuhan Sektor Bangunan yang tidak diikuti cepatnya pertumbuhan Sektor Pertambangan & Penggalan adalah karena banyaknya material bangunan yang didatangkan dari Pulau Jawa dan semen dari Makassar yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

Pemilukada Provinsi Maluku pada tahun 2014 turut memberikan dampak pada tumbuhnya Sektor Industri Kota Ambon, mengingat tingginya permintaan akan baliho, reklame, pamflet dan barang-barang sejenis untuk kepentingan kampanye. Jika dirinci menurut subsektor, subsektor Lembaga Keuangan Tanpa Bank adalah satu dari beberapa subsektor yang mengalami percepatan



pada tahun 2013. Melemahnya nilai rupiah berpengaruh terhadap transaksi di pegadaian. Nilai emas yang terus meninggi hingga mencapai Rp 450 ribu per gram, membuat nasabah pegadaian melonjak sejak September 2013, yang diperkirakan mencapai sekitar 25 persen.

Secara tidak langsung, Pendapatan Per Kapita menggambarkan tingkat kemakmuran satu negara atau daerah. Sesuai dengan konsep dan definisi, pengertian Pendapatan per Kapita suatu daerah adalah Pendapatan Regional Daerah tersebut dibagi dengan jumlah penduduk daerah tersebut pertengahan tahunnya. Sampai saat ini dalam penghitungan Pendapatan Regional Kabupaten dan Kota di Indonesia, umumnya masih hanya sebatas Pendapatan Domestik Regional, sehingga angka Pendapatan per kapita yang disajikan di sini adalah angka Pendapatan Domestik Regional per kapita. Selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, Pendapatan Domestik Regional per kapita Kota Ambon dalam penghitungan atas dasar harga berlaku selalu mengalami peningkatan. Dengan jumlah penduduk pertengahan tahun 2013 Kota Ambon sebanyak 379,62 ribu jiwa, maka diperoleh Pendapatan Domestik Regional per kapita Kota Ambon tahun 2013 yang dihitung atas dasar harga berlaku sebesar 14,6 juta rupiah setahun. Terjadi peningkatan sebesar 1,4 juta rupiah dari tahun sebelumnya atau setara dengan 10,54 persen. Nilai pendapatan per kapita tersebut bukanlah merupakan nilai riil yang diterima oleh setiap penduduk Kota Ambon, karena ada juga pelaku ekonomi yang bukan merupakan penduduk asli Kota Ambon tetapi menjadi pelaku ekonomi di wilayah Kota Ambon. Begitu pula



sebaliknya, penduduk asli Kota Ambon ada yang menjadi pelaku ekonomi di luar wilayah Kota Ambon.

Namun dalam penghitungan atas dasar harga konstan, Pendapatan Domestik Regional per kapita Kota Ambon cenderung berfluktuasi. Terakhir pada tahun 2013 tercatat sebesar Rp.5.260.001,00, lebih rendah dibandingkan pendapatan perkapita pada sebelumnya yang tercatat sebesar Rp.5.287.018,00, atau bahkan pada tahun 2009 yang tercatat sebesar Rp.5.593.412,00. Dapat diartikan bahwa 14,6 juta rupiah yang diterima tiap penduduk Kota Ambon pada tahun 2013 adalah setara dengan 5,26 juta rupiah pada tahun 2000.

1.2 Kewenangan Pemerintah Kota Ambon

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkup Pemerintah Kota Ambon mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Daerah Kota meliputi berbagai aspek seperti : Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan Wajib terdiri atas : Pendidikan, kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera, Sosial, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal Daerah, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Umum, Kepegawaian, Pemberdayaan



Masyarakat dan Desa, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika. Urusan Pilihan terdiri atas : Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan transmigrasi. Untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Kota Ambon, dibentuk Struktur Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Perda Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat DPRD Kota Ambon, Perda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kota Ambon sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kota Ambon, Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota mbon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon, Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Ambon, Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Kelurahan Kota Ambon dan Perda Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon Tipe A, Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan



Perizinan Terpadu. Kota Ambon terdiri dari 15 (lima belas) Dinas, 6 (enam) Badan, 1 (satu) Inspektorat, 3 (tiga) Kantor dan 2 (dua) Sekertariat yakni Sekertariat Kota dan Sekertariat DPRD, 5 (lima) Kecamatan, 20 (dua puluh) Kelurahan dan 4 (empat) lembaga lain.

Sekertariat Kota

Sekertariat Kota merupakan unsur staf Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Tugas pokok Sekretaris Kota adalah membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat kota.

Adapun Susunan Organisasi Sekretariat Kota adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris Kota
2. Asisten Tata Pemerintahan
 1. Bagian Tata Pemerintahan
 2. Bagian Hukum
 3. Bagian Humas dan Protokoler.
3. Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.
 1. Bagian Kerjasama dan Promosi Pengembangan Ekonomi
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
4. Asisten Administrasi
 1. Bagian Organisasi dan Manajemen.
 2. Bagian Umum dan Perlengkapan



3. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Ekspedisi

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD adalah unsur staf yang membantu pimpinan DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya.

Adapun struktur organisasi Sekretariat Dewan adalah sebagai berikut :

1. Bagian Umum, Humas dan Protokoler
2. Bagian Risalah dan Persidangan.
3. Bagian Keuangan.

Dinas-Dinas Kota

Dinas Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Walikota melalui Sekretariat Kota. Dinas Kota melaksanakan tugas dan fungsi operasional untuk bidang-bidang tertentu.

Jumlah Dinas yang ada di Kota Ambon sebanyak 15 Dinas dengan rincian sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Sosial
4. Dinas Tenaga Kerja
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6. Dinas Perhubungan
7. Dinas Pekerjaan Umum
8. Dinas Tata Kota



9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
11. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
12. Dinas Pendapatan
13. Dinas Pertanian dan Kehutanan
14. Dinas Kelautan dan Perikanan
15. Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Lembaga Teknis Kota

Lembaga Teknis Kota merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

Lembaga Teknis di Kota Ambon berjumlah 10 buah dengan rincian sebagai berikut :

1. Badan Perencanaan Pembangunan
2. Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Desa
3. Badan Kepegawaian
4. Badan Pengelola Keuangan
5. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah
6. Badan Lingkungan Hidup
7. Kantor Perpustakaan dan Kearsipan
8. Kantor Satuan Pemadam Kebakaran
9. Kantor Pengolahan Data Elektronik
10. Inspektorat

Kecamatan



Pemerintah Kecamatan merupakan Perangkat Kota yang dipimpin seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota. Organisasi Kecamatan terdiri atas Camat, Sekertaris Camat dan Seksi-Seksi

Jumlah Kecamatan yang ada di Kota Ambon sampai dengan tahun 2013 ada 5 Kecamatan, yaitu : Kecamatan Sirimau, Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Teluk Ambon, Kecamatan Teluk ambon Baguala, Kecamatan Leitimur Selatan.

Lembaga Lain

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
3. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A
4. Sekretariat KORPRI



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis local, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena demikian pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Ambon tahun 2014 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2013 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Ambon tahun 2011 - 2016. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon tahun 2011 - 2016 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (Perencanaan Jangka Menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu – isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat di implementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan



2.2 Visi – Misi Kota Ambon

Visi Berkaitan Dengan Pandangan Kedepan Menyangkut Kemana instansi pemerintah harus dibawah dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Ambon tahun 2011 – 2016 disusun dengan tujuan : 1) sebagai pedoman penyenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat ; 2) sebagai acuan Rencana Pembangunan Tahunan Kota Ambon,; dan 3) sebagai pedoman kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Upaya untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, religius, lestari dan harmonis merupakan obsesi dari Pemerintah Kota Ambon melalui perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi antara tujuan yang hendak dicapai dan Visi pembangunan yang mengandung pola pikir dan pola tindak dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon Tahun 2011 – 2016.

Dengan memperhatikan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, mempertimbangkan kemajuan pembangunan Kota Ambon yang telah dicapai pada periode 2006-2011, memperhitungkan hasil analisis isu strategis, memperhatikan RPJPD Kota Ambon 2006-2026, mengacu pada visi



dan misi Walikota dan Wakil Walikota Ambon terpilih untuk masa bakti 2011-2016, mempertimbangkan prioritas pembangunan Provinsi Maluku dalam RPJMD tahun 2008-2013 dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014, serta bertumpu pada fondasi **“Benahi Ambon, Menata Kota, Membangun Negeri”**, maka visi Kota Ambon 2011 – 2016 adalah :

“Ambon Yang Maju, Mandiri, Religius, Lestari Dan Harmonis Berbasis Masyarakat”

Visi tersebut mengandung makna atau filosofi bahwa:

Maju berarti terwujudnya kondisi masyarakat yang berkembang dan berorientasi pada upaya memajukan Kota Ambon dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan hidup, social budaya dan hukum dengan dilandasi sikap disiplin, professional, beretos kerja tinggi dan kapasitas serta kapabilitas diri setiap insan masyarakat Kota Ambon.

Mandiri berarti sanggup mengurus diri untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan standar pelayanan minimal, meliputi peningkatan pelaksanaan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan peningkatan ekonomi masyarakat atau keluarga dengan memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya lokal atas dasar pembangunan yang berbasis keunggulan kompetitif, meningkatkan peran swasta dalam upaya mendorong pengembangan investasi dalam pengelolaan potensi sumberdaya alam yang ramah lingkungan serta membuka aksesibilitas Kota Ambon terhadap pasar baik lokal maupun internasional untuk pembangunan masyarakat yang lebih baik.



Religius berarti terwujudnya warga kota yang beragama secara substansial dan fungsional dengan ciri yang inklusif, humanis, egaliter, dan kosmopolit dalam membangun Kota Ambon yang aman dan damai.

Lestari berarti upaya pengelolaan sumber daya alam, seni dan budaya lokal yang menjamin pemanfaatan dan perlindungannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap menjaga, memelihara, dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya untuk pembangunan Kota Ambon Manise yang berbudaya, nyaman dan damai serta ramah lingkungan.

Harmonis berarti kehidupan warga kota yang saling menghargai antar sesama orang basudara dengan prinsip-prinsip budaya pela gandong yang mampu membawa warga kota hidup damai dan toleran, rukun dan teratur dalam kompleksitas multicultural baik agama maupun etnik.

Untuk mewujudkan visi Kota Ambon 2011 – 2016 yaitu **“Ambon Yang Maju, Mandiri, Religius, Lestari Dan Harmonis Berbasis Masyarakat”**, maka dijabarkan dalam 8 (delapan) misi yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kota Ambon :

1. Menata dan meningkatkan profesionalisme birokrasi dalam pelayanan masyarakat.

Salah satu agenda yang menjadi fokus pembangunan Kota Ambon adalah menciptakan tata pemerintahan yang bersih, dan berwibawa. Agenda tersebut merupakan upaya menata dan meningkatkan profesionalisme birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi,



menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan kebijakan yang terarah pada peningkatan standar manajemen profesionalisme; sumber daya manusia aparatur (birokrat) yang memiliki semangat, disiplin, ethos dan kinerja; perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif.

2. Meningkatkan kesejahteraan penduduk dibidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar.

Pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar merupakan pilar terpenting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas manusia, bahkan kinerja pendidikan yaitu gabungan angka partisipasi kasar (APK) jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi dan angka melek aksara bersama-sama dengan variabel kesehatan dan ekonomi digunakan sebagai variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu pembangunan pendidikan di Kota Ambon harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Dilain pihak Kesehatan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam



pelaksanaan pembangunan kesehatan dibutuhkan perubahan cara pandang (*mindset*) dari paradigma sakit ke paradigma sehat.

3. Menata dan membenahi kota sesuai fungsi dan peruntukan

Menata dan membenahi kota dimaksudkan untuk memantapkan sistem pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi dan karakteristik wilayah kota Ambon, didukung dengan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan ruang sesuai peruntukan guna menjamin dinamika pembangunan berkelanjutan. Dilain pihak membenahi Ambon diarahkan pada sasaran kondisi infrastruktur seperti jaringan jalan, jaringan transportasi, jaringan drainase, persampahan, sumberdaya air dan pelayanan air bersih, serta sarana prasarana lainnya masih belum mengimbangi perkembangan dinamika masyarakat terutama di wilayah pengembangan. Usaha menata dan membenahi ruang kota yang konsisten akan menghasilkan struktur dan pola tata ruang yang serasi, lestari dan optimal didukung pengembangan infrastruktur yang efektif dan efisien.

4. Menata penduduk dan kependudukan

Kota Ambon dalam kedudukannya sebagai ibu kota Propinsi Maluku sekaligus berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi , pemerintahan dan pendidikan membawa pengaruh besar pada pertumbuhan penduduk terkait dengan migrasi dari daerah-daerah sekitar. Kondisi ini memerlukan penataan penduduk dan sistem kependudukan agar tertib dan mencegah kota Ambon tumbuh menjadi kota kumuh

5. Menata dan meningkatkan lingkungan lestari berbasis partisipatif dan kolaboratif



Beberapa faktor yang masih harus menjadi perhatian di bidang lingkungan adalah kondisi daerah aliran sungai (DAS) dan pengelolaan konservasi area tangkapan (*catchment area*). Maraknya penyalahgunaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan *catchment area* berdampak pada fungsi dan daya dukung bantaran sungai dan *catchment area* menjadi rendah, sehingga jika hujan di hulu maka debit limpasan air tidak mampu ditahan karena kapasitas saluran turun diakibatkan sedimentasi dan sampah.

6. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri kerakyatan berbasis potensi wilayah/daerah

Penguatan ekonomi masyarakat diharapkan akan mampu mendorong peningkatan kemampuan masyarakat sehingga memiliki kemampuan bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan. Dengan pendampingan dan penguatan institusi lokal, bantuan dana bergulir bagi masyarakat, dan bantuan pembangunan sarana prasarana, diharapkan dapat memperkuat kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu pengembangan pasar-pasar tradisional perlu mendapatkan perhatian sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Ambon.

7. Meningkatkan kehidupan orang basudara berbasis kearifan lokal

Rekonsiliasi merupakan sarana efektif untuk ambon yang maju, mandiri, religius, lestari dan harmonis. Konflik sosial di masa lampau berpotensi muncul kembali ke permukaan apabila tidak dilakukan penyelesaian secara menyeluruh melalui cara-cara yang tepat. Agar proses konsolidasi demokrasi berjalan dengan efektif, masyarakat Kota Ambon perlu melakukan rekonsiliasi antar orang



basudara dengan mengembangkan khasana budaya lokal sebagai suatu kearifan lokal untuk menyelesaikan konflik-konflik masa lalu tersebut.

8. Meningkatkan sistem penegkan hukum dan peran institusi sosial budaya masyarakat

Hukum adalah instrumen untuk melindungi kepentingan individu dan sosial. Saat ini timbul degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat. Gejala ini ditandai dengan meningkatnya apatisme seiring dengan menurunnya tingkat apresiasi masyarakat baik kepada substansi hukum maupun kepada struktur hukum yang ada. Hal ini telah tercermin dari peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi di masyarakat. Sebagai akibatnya timbul ketidakpastian hukum yang tercipta melalui proses pembenaran perilaku salah dan menyimpang atau dengan kata lain hukum hanya merupakan instrumen pembenar bagi perilaku salah. Peranan institusi-institusi hukum maupun institusi sosial budaya dalam masyarakat merupakan kunci bagi supremasi hukum untuk kepentingan pembangunan.

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan Kota Ambon tersebut, pilar pembangunan dalam lima tahun mendatang (2011-2016) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar;
2. Mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan perekonomian daerah yang ditujukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi



- melalui pengembangan kawasan-kawasan strategis, dan pengembangan usaha ekonomi kecil dan mikro;
3. Membangun infrastruktur dasar dan membenahi sistem transportasi dengan jaringan pendukungnya;
 4. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui pengembangan jaringan PUSKEMAS, dan pusat-pusat rujukan pelayanan kepada masyarakat miskin;
 5. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dengan meningkatkan angka melek huruf, APK dan APM semua jenjang pendidikan serta rata-rata lama bersekolah masyarakat;
 6. Membangun infrastuktur pendidikan, meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk menghasilkan anak Ambon yang cerdas;
 7. Membenahi sistem persampahan kota dan mengembangkan model pengelolaan yang ramah lingkungan menuju Kota Ambon Manise;
 8. Meningkatkan kinerja organisasi dan manajemen pemerintah yang profesional untuk mencapai standar pelayanan minimal kepada masyarakat;
 9. Mengembangkan Ambon sebagai kota minapolitan, pusat aktifitas ekonomi dan transit bisnis Maluku dan sebagai kota pendidikan dan kota pariwisata;
 10. Meningkatkan kehidupan orang basudara dan penegakan hukum, politik dan HAM;
 11. Mengembangkan seni dan budaya lokal serta pariwisata;
 12. Mengembangkan peran generasi muda dan prestasi olahraga;



13. Merevitalisasi tata ruang kota yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan fungsi peruntukannya.

14. Meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian pembangunan serta pemberantasan dan pencegahan korupsi

2.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Ambon yang akan diwujudkan sebagai bentuk akhir dalam mewujudkan misi guna mendukung tercapainya visi yang dicita-citakan yaitu menjadikan Ambon Yang Maju, Mandiri, Religius, Lestari Dan Harmonis Berbasis Masyarakat, dalam lima tahun ke depan (2011-2016), adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Ambon

Visi : “Ambon Yang Maju, Mandiri, Religius, Lestari Dan Harmonis Berbasis Masyarakat		
Misi	Tujuan	Sasaran
<i>Misi ke – 1 : Menata dan meningkatkan profesionalisme birokrasi dalam pelayanan masyarakat</i>	1. Terwujudnya birokrat yang professional	1.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah 1.2 Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat
	2. Terwujudnya standar pelayanan minimal	2.1 Meningkatkan penerapan SPM dan kinerja di semua aspek pelayanan publik
	3. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	3.1 Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan dasar dan menengah 3.2 Meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah 3.3 Meningkatkan mutu dan kapasitas guru 3.4 Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana pendidikan
<i>Misi ke – 2 : Meningkatkan kesejahteraan penduduk dibidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar</i>		



	4. Meningkatkan derajat kesehatan dan akses pelayanan kesehatan masyarakat	4.1 Meningkatkan jangkauan layanan kesehatan 4.2 Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat
	5. Meningkatkan layanan dan mutu infrastruktur dasar	5.1 Tersedianya sarana dan prasarana air bersih 5.2 Tersedianya sarana dan prasarana listrik 5.3 Tersedianya sarana dan prasarana telekomunikasi 5.4 Meningkatnya sarana dan prasarana jalan
<i>Misi ke - 3 : Menata dan membenahi kota sesuai fungsi dan peruntukan</i>	6. Meningkatkan mutu lingkungan perkotaan	6.1 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan kawasan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah 6.2 Berkurangnya kawasan kumuh perkotaan
	7. Meningkatkan mutu infrastuktur dasar kota	7.1 Tertatanya sistem transportasi masyarakat 7.2 Meningkatnya pelayanan persampahan
<i>Misi ke - 4: Menata penduduk dan kependudukan</i>	8. Meningkatkan pengelolaan administrasi kependudukan	8.1 Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan
	9. Meningkatkan akses dan kualitas program keluarga berencana	9.1 Meningkatnya peserta KB aktif bagi pasangan usia subur
<i>Misi ke - 5 : Menata dan meningkatkan lingkungan lestari berbasis partisipatif dan kolaboratif</i>	10. Meningkatkan pengendalian dan pelestarian lingkungan	10.1 Meningkatnya ruang terbuka hijau
	11. Memantapkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang efektif, efisien dan ramah lingkungan	11.1 Tersedianya peraturan daerah yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
<i>Misi ke - 6 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri kerakyatan berbasis potensi wilayah/ daerah</i>	12. Mengembangkan lembaga ekonomi kerakyatan	12.1 Meningkatnya usaha UMKM dan koperasi 12.2 Meningkatnya kesempatan kerja 12.3 Meningkatnya pendapatan masyarakat
	13. Mengembangkan komoditas unggulan industry pengolahan yang berdaya saing terutama industry pengolahan hasil	13.1 Meningkatnya produktivitas industri pengolahan berbasis perikanan, kelautan, pertanian, perkebunan dan peternakan serta



	perikanan, kelautan, pertanian serta pariwisata	pariwisata
<i>Misi ke - 7 :Meningkatkan kehidupan orang basudara berbasis kearifan lokal</i>	14.Mewujudkan kehidupan orang basudara berbasis kearifan lokal	14.1Meningkatnya keamanan dan ketertiban di masyarakat
	15.Mengembangkan seni dan budaya lokal	15.1Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya lokal
<i>Misi ke - 8 :Meningkatkan sistem penegakan hukum dan peran institusi sosial budaya masyarakat</i>	16.Memantapkan tata kehidupan masyarakat yang damai, aman, tertib, taat hukum, dan harmonis	16.1Terwujudnya penegakan dan pengembangan hukum secara adil dan bertanggungjawab

2.4 Prioritas Pembangunan

Prioritas pembangunan disusun untuk lebih mengoperasionalkan visi dan misi dalam pengimplementasiannya, sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2011-2016, maka prioritas pembangunan akan diarahkan pada :

- 1) Prioritas 1 : Penataan birokrasi dan peningkatan profesionalisme dalam pelayanan publik
- 2) Prioritas 2 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan
- 3) Prioritas 3 : Peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur dalam upaya menata dan membenahi kota sesuai fungsi dan peruntukkan
- 4) Prioritas 4 : Penataan dan peningkatan lingkungan lestari berbasis partisipatif dan kolaboratif
- 5) Prioritas 5 : Peningkatan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan potensi daerah
- 6) Prioritas 6 : Peningkatan kehidupan orang basudara berbasis kearifan lokal



- 7) Prioritas 7 : Peningkatan sistem penegakan hukum dan peran institusi social budaya masyarakat

2.5 Indikator Kinerja Daerah 2014

Indikator kinerja daerah Kota Ambon dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Indikator kinerja daerah Kota Ambon Tahun 2014 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
I	ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT		
I.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian		
1	Pertumbuhan PDRB	%	6.50 - 6.65
2	Pendapatan Per Kapita	Rp.	6.392.791
3	Angka Kemiskinan	%	5.00 - 6.50
4	Laju Inflasi	%	4.50 - 5.00
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8.50 - 9.00
I.2.	PENDIDIKAN		
	APK PAUD	%	42.55
1	Penduduk yang berusia >15 thn melek huruf (tidak buta aksara)	%	99.91
2	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0
3	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0
4	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA	%	0.20
5	Angka Putus Sekolah (APS) SMK	%	0.69
6	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100
7	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99.9
8	Angka Kelulusan (AL) SMA/MA	%	99.98
9	Angka Kelulusan (AL) SMK	%	99.96
10	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11.4
I.3	KESEHATAN		
1	Angka Kematian Ibu Melahirkan	/100.000 KLH	24
2	Angka Kematian Bayi	/1.000 KLH	2.9
3	Angka Kematian Balita	/1.000 KLH	3.6
4	Kasus Gizi Buruk	%	0
5	Kasus Gizi Kurang	%	3.2
6	Desa Siaga Aktif	%	45
7	KB Aktif	%	72
8	Air Bersih yang memenuhi syarat	%	75
11	UCI Desa	%	100
12	Usia Harapan Hidup	tahun	73.45
1.4	KETENAGAKERJAAN		
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	74.00
II	ASPEK PELAYANAN UMUM		ASPEK PELAYANAN UMUM



Pendidikan			
1	Angka Partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	%	102.72
2	Angka Partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	96.15
3	Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	79.92
4	Ratio Guru : Murid SD/MI		1 : 17
5	Ratio Guru : Murid SMP/MTs		1 : 15
6	Ratio Guru : Murid SMA/MA		1 : 16
7	Ratio Sekolah : Siswa SD/MI		1 : 199
8	Ratio Sekolah : Siswa SMP/MTs		1 : 300
9	Ratio Sekolah : Siswa SMA/MA		1 : 370
Kesehatan			
	ratio posyandu per satuan balita		1 : 90
	gizi buruk		0
	Jumlah Puskesmas	Buah	25
	Jumlah Rumah Sakit	Buah	10
Pekerjaan Umum			
	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	%	90.00
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH		ASPEK DAYA SAING DAERAH
III.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian		
	Jumlah Kantor Bank	unit	50
	Produksi Listrik	KWh	233,052,745
III	Pariwisata		
	Banyaknya Hotel	Unit	58
	Angka Kunjungan Wisata	orang	6.750
	Objek Wisata yang dikembangkan	persen	50
II.2	LINGKUNGAN		
1	Kawasan Kumuh	%	20
2	Ruang Terbuka Hijau	%	17
II.3	KOPERASI		
1	Terwujudnya koperasi berkualitas	Unit	200
2	Terwujudnya usaha mikro kecil yang tangguh dan mandiri	UMK	205
3	Terwujudnya usaha Menengah yang berdaya saing	UM	9
4	Terbentuknya koperasi Wanita PKK baru di setiap Negeri/Kelurahan	Unit	50
5	Terwujudnya sarjana wirausaha baru	Orang	142
6	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor KUMKM sebesar 5 % per tahun dari kondisi tahun 2010	Orang	9,751
II.4	KEHUTANAN		
1	Luas Lahan Kritis	Ha	8.207,02

2.6 Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja

Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun dan kegiatan tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan



untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Ambon Tahun 2014 adalah serangkaian kesepakatan/ pernyataan kinerja yang memuat sasaran-sasaran strategis, Indikator Kinerja dan Target Capaian Kinerja Pemerintah Kota Ambon Tahun 2014 berdasarkan indikator kinerja utama yang ditetapkan dengan keputusan Walikota Ambon Nomor 144 Tahun 2014.

Misi ke - 1 :Menata dan meningkatkan profesionalisme birokrasi dalam pelayanan masyarakat

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target
Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah meningkat	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	D
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat	Opini pemeriksaan BPK	WDP
Penerapan SPM dan peningkatan kinerja di semua aspek pelayanan publik	-Jumlah SPM	15

Misi ke - 2 : Meningkatkan kesejahteraan penduduk dibidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target
Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan	Angka partisipasi kasar SD/MI	107,25
	SMP/MTS	94,25
	SMA/SMK/MA	97,25
	Angka partisipasi murni SD/MI	88,00
	SMP/MTS	66,00
	SMA/SMK/MA	68,00
	Rata-rata lama sekolah	11,40
Meningkatkan mutu	Angka kelulusan SD/MI	100%



pendidikan dasar dan menengah	SMP/MTS SMA/SMK/MA	100% 100%
Meningkatnya mutu dan kapasitas guru	Presentase guru bersertifikasi	70%
Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan	Rasio ruang kelas : siswa SD/MI SMP/MTS SMA/SMK/MA	1 : 33 1 : 34 1 : 36
Peningkatan jangkauan layanan kesehatan	Kecamatan dengan Puskesmas Rawat Inap	60%
Meningkatnya mutu layanan kesehatan	Usia Harapan Hidup	73,45 tahun
Tersedianya sarana dan prasarana air bersih	Jumlah Keluarga yang terlayani satuan sambungan air bersih	17.450
Tersedianya sarana dan prasarana listrik	Jumlah Produksi Listrik per tahun	290 juta KWH
Tersedianya sarana dan prasarana telekomunikasi	Pelayanan Internet kecamatan	60%
Meningkatnya sarana dan prasarana jalan	Ratio panjang jalan dalam kondisi baik	87%

Misi ke - 3 : Menata dan membenahi kota sesuai fungsi dan peruntukan

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan kawasan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	75%
Berkurangnya kawasan kumuh di perkotaan	Luas kawasan kumuh	103 ha
Tertatanya sistem transportasi masyarakat	LOAD Faktor Angkutan Umum	67,50
Meningkatnya pelayanan persampahan	Cakupan pelayanan sampah masyarakat	65%

Misi ke - 4 : Menata penduduk dan kependudukan

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target
Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan	Jumlah penduduk ber KTP terhadap jumlah penduduk wajib KTP	80%
Meningkatnya peserta KB aktif bagi Pasangan Usia Subur	Jumlah Peserta KB Aktif terhadap jumlah PUS	80%



Misi ke - 5 : Menata dan meningkatkan lingkungan lestari berbasis partisipatif dan kolaboratif

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target
Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	Ratio Ruang Terbuka Hijau	17%
Tersedianya peraturan daerah yang mengatur pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Perda tentang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	2

Misi ke - 6 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri kerakyatan berbasis potensi wilayah/daerah

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target
Meningkatnya usaha UMKM dan Koperasi	Pertumbuhan UMKM dan Koperasi	7,5%
Meningkatnya kesempatan kerja	Penyerapan tenaga kerja sektor UMKM dan Koperasi	25%
Meningkatkan pendapatan masyarakat	Pendapatan perkapita masyarakat	6,3 juta
Meningkatkan produktivitas industri pengolahan berbasis perikanan, kelautan, pertanian, perkebunan dan peternakan serta pariwisata	Meningkatnya proporsi sektor industri terhadap PDRB	2,75%
	Angka kunjungan wisatawan mancanegara	550 orang

Misi ke - 7 : Meningkatkan kehidupan orang basudara berbasis kearifan lokal

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target
Meningkatnya keamanan dan ketertiban di masyarakat	Gangguan Kamtibmas	700 kasus
Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya lokal	Pagelaran seni dan budaya lokal dalam 1 tahun	20 kali

Misi ke - 8 : Meningkatkan sistem penegakan hukum dan peran institusi sosial budaya masyarakat



Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target
Terwujudnya penegakan dan pengembangan hukum secara adil dan bertanggung jawab	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum	50%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam mengukur capaian kinerja Pemerintah Kota Ambon Tahun 2014, didasarkan pada format yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Ambon Tahun 2014 dengan realisasinya.

Indikator yang dibangun merupakan indikator baru sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ambon, sehingga beberapa indikator belum dapat dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pencapaian kinerja Pemerintah Kota Ambon dalam Tahun 2014 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun rutin. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:



$$\text{Presentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Presentase tingkat capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 s/d 100 : Sangat Berhasil

$70 \leq X < 85$: Berhasil

$55 \leq X < 70$: Cukup Berhasil

$X < 55$: Tidak Berhasil

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja



ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator keluaran dan hasil (*outcomes*). Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja agar setiap stakeholder maupun instansi penilai akuntabilitas mengetahui sejauhmana capaian kinerja Pemerintah Kota Ambon.

Namun pengukuran pencapaian sasaran di tahun 2014 sebagian belum dapat dibandingkan dengan capaian sasaran tahun-tahun sebelumnya, karena indikator yang digunakan merupakan indikator baru yang terdapat dalam dokumen RPJMD Kota Ambon Tahun 2011-2016.

1) Capaian Indikator Kinerja Daerah

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2011-2016 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Data dan informasi juga



berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja yang digunakan antara lain: Indikator kemajuan otonomi daerah, kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, indeks pembangunan daerah, daya saing daerah dan daya tarik investasi. Secara keseluruhan hasil akhir tujuan otonomi daerah menggunakan paramater “Peningkatan Kualitas Manusia” dan Indikatornya adalah nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu; aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Capaian Indikator kinerja daerah dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
I	ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT			
I.I.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			
1	Pertumbuhan PDRB	%	6.50 - 6.65	5.2
2	Pendapatan Per Kapita	Rp.	6.392.791	5.260.000
3	Angka Kemiskinan	%	5.00 - 6.50	5.46
4	Laju Inflasi	%	4.50 - 5.00	4.79



5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8.50 - 9.00	14,62
I.2.	PENDIDIKAN			
	APK PAUD	%	42.55	18,71
1	Penduduk yang berusia >15 thn melek huruf (tidak buta aksara)	%	99.91	99,99
2	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0	0
3	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0	0.01
4	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA	%	0.20	0.22
5	Angka Putus Sekolah (APS) SMK	%	0.69	0
6	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	99.80
7	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99.9	99.83
8	Angka Kelulusan (AL) SMA/MA	%	99.98	98.69
9	Angka Kelulusan (AL) SMK	%	99.96	99.28
10	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11.4	99.28
I.3	KESEHATAN			
1	Angka Kematian Ibu Melahirkan	/100.000 KLH	24	30
2	Angka Kematian Bayi	/1.000 KLH	2.9	3.3
3	Angka Kematian Balita	/1.000 KLH	3.6	0.9
4	Kasus Gizi Buruk	%	0	0.1
5	Kasus Gizi Kurang	%	3.2	1.2
6	Desa Siaga Aktif	%	45	100
7	KB Aktif	%	72	72.62
8	Air Bersih yang memenuhi syarat	%	75	97.5
11	UCI Desa	%	100	90
12	Usia Harapan Hidup	tahun	73.45	73.03
I.4	KETENAGAKERJAAN			
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	74.00	58.46
II	ASPEK PELAYANAN UMUM			
	Pendidikan			
1	Angka Partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	%	102.72	95.54
2	Angka Partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	96.15	80.47
3	Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	79.92	72.92
4	Ratio Guru : Murid SD/MI		1 : 17	1:17
5	Ratio Guru : Murid SMP/MTs		1 : 15	1:15
6	Ratio Guru : Murid SMA/MA		1 : 16	1:16
7	Ratio Sekolah : Siswa SD/MI		1 : 199	1:195
8	Ratio Sekolah : Siswa SMP/MTs		1 : 300	1:336
9	Ratio Sekolah : Siswa SMA/MA		1 : 370	1:387
	Kesehatan			
1	ratio posyandu per satuan balita		1 : 90	1:175
2	gizi buruk		0	0.1
3	Jumlah Puskesmas	Buah	25	22
4	Jumlah Rumah Sakit	Buah	10	10
	Pekerjaan Umum			
1	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	%	90.00	92.00
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH			
III.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			
	Jumlah Kantor Bank	unit	50	54
	Produksi Listrik	KWh	233,052,745	266,136,423
III	Pariwisata			
	Banyaknya Hotel	Unit	58	35
	Angka Kunjungan Wisata	orang	6.750	



	Objek Wisata yang dikembangkan	persen	50	50
II.2	LINGKUNGAN			
1	Kawasan Kumuh	%	20	20
2	Ruang Terbuka Hijau	%	17	16
II.3	KOPERASI			
1	Terwujudnya koperasi berkualitas	Unit	200	617
2	Terwujudnya usaha mikro kecil yang tangguh dan mandiri	UMK	205	210
3	Terwujudnya usaha Menengah yang berdaya saing	UM	9	1
4	Terbentuknya koperasi Wanita PKK baru di setiap Negeri/Kelurahan	Unit	50	3
5	Terwujudnya sarjana wirausaha baru	Orang	142	50
6	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor KUMKM sebesar 5 % per tahun dari kondisi tahun 2010	Orang	9,751	9,750
II.4	KEHUTANAN			
1	Luas Lahan Kritis	Ha	8.207,02	6.939.09

Sumber : Kota Ambon Dalam Angka, 2014 dan hasil analisis SKPD terkait

Berdasarkan data pada tabel di atas, pencapaian aspek kesejahteraan rakyat belum mencapai target yang ditetapkan yaitu pada indikator pertumbuhan PDRB dan pendapatan perkapita masyarakat. Untuk itu untuk tahun-tahun yang akan datang akan Pemerintah Kota Ambon akan fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sedangkan untuk aspek pelayanan umum dan daya saing daerah juga terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan.

2) Capaian Indikator Kinerja

Pemerintah Kota Ambon secara umum telah dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Ambon 2011-2016. 28 sasaran yang ditetapkan pada tahun anggaran 2014 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Walikota Ambon Nomor 144 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Ambon, memiliki 39 indikator sasaran.

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci sebagai berikut :



Sasaran 1 : Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah meningkat

Tabel 3.2
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1

No	Indikator sasaran	Tahun 2014		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	D	C	166,6

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah meningkat, di ketahui bahwa dari satu indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja di atas 100% atau bermakna sangat berhasil. Indikator nilai akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Ambon di tahun 2014 adalah C lebih tinggi dari target yang ditetapkan, namun sesuai kategori akuntabilitas kinerja nilai tersebut masih sangat kurang dan perlu banyak perbaikan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di tahun 2014 nilai akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Ambon tidak mengalami peningkatan. Berdasarkan evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, beberapa hal yang menjadi hambatan pelaksanaan indikator kinerja di atas adalah :

1. SKPD belum menjadikan RPJMD sebagai acuan dalam menyusun renstra.
2. Evaluasi program masih fokus pada anggaran dan pelaksanaan kegiatan dan belum fokus pada hasil dari pelaksanaan program/kegiatan.
3. Kurangnya kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh SKPD.



Dalam rangka mewujudkan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah yang lebih baik dan meningkat sesuai rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB, maka pemerintah Kota Ambon telah melakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Mengunggah LAKIP tahun sebelumnya dan tahun 2014 ke situs resmi Pemerintah Kota Ambon
2. Membangun sistem e-SAKIP di tahun 2015 yang diharapkan mampu meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Ambon sehingga dapat menjadi lebih baik, jelas dan terukur.

Realisasi capaian sasaran tahun lalu, tahun ini dan rencana sesuai tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Indikator Sasaran	Tahun 2013	Tahun 2014	Rencana Sesuai RPJMD 2016	Presentase Capaian Kinerja (%)
1	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	C	C	C	100%

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator sasaran nilai akuntabilitas kinerja pemerintah tahun 2014 di bandingkan dengan tahun lalu tidak mengalami peningkatan dan rencana sesuai RPJMD telah mencapai target yang ditetapkan untuk rencana akhir 2016 atau telah mencapai capaian 100%.

Sasaran 2 : Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat

Tabel 3.3
Evaluasi Pencapaian Sasaran 2

No	Indikator sasaran	Tahun 2014		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Opini pemeriksaan BPK	WDP	WDP	100

Tabel 3.3 memperlihatkan bahwa target pencapaian indikator opini pemeriksaan BPK terealisasi 100%. Untuk tahun 2014 laporan keuangan



pemerintah daerah Kota Ambon mendapat status Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku. Pemberian status WDP tersebut atas penilaian yang dilakukan untuk beberapa kriteria, diantaranya kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan mengungkapkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektifitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan rekomendasi dari BPK Perwakilan Provinsi Maluku, yang menjadi kendala sehingga Kota Ambon belum dapat meraih opini WTP adalah sistem pengelolaan aset yang belum dikelola dengan baik.

Untuk menjawab kendala yang dihadapi kedepannya Pemerintah Kota Ambon telah mengambil langkah kebijakan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk mengelola sistem aset yang selama ini bermasalah sehingga opini WTP dapat diraih.

Realisasi capaian sasaran tahun lalu, tahun ini dan rencana sesuai tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Indikator Sasaran	Tahun 2013	Tahun 2014	Rencana Sesuai RPJMD 2016	Presentase Capaian Kinerja (%)
1	Opini pemeriksaan BPK	Disclaimer	WDP	WDP	100%

Berdasarkan tabel di atas, capaian tahun 2014 untuk opini pemeriksaan BPK di bandingkan dengan tahun lalu mengalami peningkatan dari disclaimer ke WDP dan rencana sesuai RPJMD telah mencapai target yang ditetapkan untuk rencana akhir 2016 atau telah mencapai capaian 100% di tahun 2014.

Sasaran 3 : Penerapan SPM dan peningkatan kinerja di semua aspek pelayanan publik



Tabel 3.4
Evaluasi Pencapaian Sasaran 3

No	Indikator sasaran	Tahun 2014		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah SPM	15	15	100

Berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran penerapan SPM dan peningkatan kinerja di semua aspek pelayanan publik adalah 100% atau dapat dikategorikan sangat berhasil. Jumlah SPM yang ditetapkan sebanyak 15 SPM, dan telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Ambon Nomor 27 Tahun 2014 Tanggal 6 Agustus 2014 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon. Dalam Perwali SPM tersebut telah ditetapkan indikator pelayanan dasar, target capaian, program/kegiatan dan anggaran dari masing-masing SPM. Dengan adanya 15 SPM yang telah ditetapkan di harapkan semua standar pelayanan secara minimal dapat dirasakan oleh masyarakat dan terjadi peningkatan kinerja di semua aspek pelayanan publik.

Realisasi capaian sasaran tahun lalu, tahun ini dan rencana sesuai tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Indikator Sasaran	Tahun 2013	Tahun 2014	Rencana Sesuai RPJMD 2016	Presentase Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah SPM	15	15	15	100

Berdasarkan tabel di atas, capaian tahun 2014 di bandingkan dengan tahun lalu tidak mengalami peningkatan dan rencana sesuai RPJMD telah mencapai target yang ditetapkan untuk rencana akhir 2016 atau telah mencapai capaian 100%.



Sasaran 4 : Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan

Tabel 3.4

Evaluasi Pencapaian Sasaran 4

No	Indikator Sasaran	Tahun 2014		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Angka partisipasi kasar SD/MI	107,25 %	106,41 %	99,21 %
	SMP/MTS	94,25 %	87,88 %	93,24 %
	SMA/SMK/MA	97,25 %	85,57 %	87,98 %
2.	Angka partisipasi murni SD/MI	88,00 %	95,54 %	108,56 %
	SMP/MTS	66,00 %	80,47 %	121,92 %
	SMA/SMK/MA	68,00 %	72,92 %	107,23 %
3.	Rata-rata lama sekolah	11,40 %	11,40 %	100%

Capaian angka partisipasi kasar SD/MI tahun 2014 adalah sebesar 99,21%, SMP/MTS sebesar 93,24%, SMA/SMK/MA sebesar 87,98%. APK tertinggi berada pada tingkat SD/MI dan terendah pada tingkat SMA/SMK/MA. Realisasi APK SD/MI tahun 2014 adalah 106,41% diperoleh dari jumlah siswa pada jenjang SD/MI sebanyak 40.892 orang di bagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 38.326 orang. Selanjutnya realisasi APK SMP/SMK/MA tahun 2014 adalah 87,88% diperoleh dari jumlah siswa pada jenjang SMP/MTS sebanyak 19.134 orang dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun sebanyak 21.772 orang. Sedangkan untuk SMA/SMK/MA realisasi APK sebesar 85,57 % diperoleh dari jumlah siswa SMA/SMK/MA sebanyak 21.680 orang dibagi jumlah penduduk usia 16-18 tahun sebanyak 25.336 orang.

Pencapaian APM SD/MI pada tahun 2014 sebesar 95,54% APM SMP/MTS 80,47% dan APM SMA/SMK/MA adalah sebesar 72,92%. APM tertinggi terdapat pada tingkat SD/MI terendah pada tingkat SMA/SMK/MA.



Realisasi capaian sasaran tahun lalu, tahun ini dan rencana sesuai tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Indikator Sasaran	Tahun 2013	Tahun 2014	Rencana Sesuai RPJMD 2016	Presentase Capaian Kinerja (%)
1	Angka partisipasi kasar SD/MI	105,35%	106,41 %	107,75%	98,75
	SMP/MTS	87,50%	87,88 %	94,75%	92,74
	SMA/SMK/MA	85,45%	85,57 %	97,75%	87,53
	Angka partisipasi murni SD/MI	95,38%	95,54 %	89,00%	107,34
	SMP/MTS	79,81%	80,47 %	67,00%	120,10
	SMA/SMK/MA	71,96%	72,92 %	69,00%	105,68
	Rata-rata lama sekolah	11,40%	11,40	11,60%	98,27

Berdasarkan tabel di atas, untuk indikator sasaran angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni mengalami peningkatan capaian di tahun 2014 di dibandingkan dengan tahun 2013 dan dalam rencana sesuai RPJMD telah mencapai dan melewati target yang ditetapkan untuk indikator angka partisipasi murni, capaian untuk APM SD/MI 107,34%, APM SMP/MTS 120,10%, APM SMA/SMK/MA 105, 68% atau telah mencapai capaian 100%.

Sasaran 5 : Meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah

Tabel 3.5
Evaluasi Pencapaian Sasaran 5

No	Indikator sasaran	Tahun 2014		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Angka kelulusan SD/MI	100 %	99,80	99,80
	SMP/MTS	100 %	99,83	99,83
	SMA/SMK/MA	100 %	98,84	98,84

Indikator sasaran angka kelulusan SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA untuk sasaran meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah di tahun 2014 tidak mencapai target 100%, namun rata-rata telah mencapai capaian di atas 85% atau bermakna sangat berhasil.



Angka kelulusan SD/MI mencapai realisasi 99,80%, hal ini dikarenakan terdapat 13 siswa dari keseluruhan jumlah 6.392 siswa yang telah terdaftar sebagai peserta ujian namun tidak mengikuti ujian. Angka kelulusan SMP/MTS mencapai 99,83% karena terdapat 10 siswa yang tidak memenuhi standar nilai kelulusan. Angka kelulusan SMA/SMK/MA mencapai 98,69% karena terdapat 63 siswa dari 4.825 siswa yang tidak memenuhi standar nilai kelulusan.

Berbagai hal lain yang menjadi kendala pencapaiannya adalah :

1. Komposisi soal UN lebih sulit dari tahun sebelumnya.
2. Nilai kelulusan ujian sekolah lebih rendah sehingga tidak memenuhi standar yang diberlakukan secara nasional.
3. Ketrampilan mengisi LJUN rendah oleh siswa. Hal ini merupakan dampak dari pelaku pendidikan yang belum memahami teknis pelaksanaan ujian nasional di lapangan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut para siswa yang tidak lulus telah diarahkan untuk mengikuti program kejar Paket B dan Paket C.

Realisasi capaian sasaran tahun lalu, tahun ini dan rencana sesuai tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Indikator Sasaran	Tahun 2013	Tahun 2014	Rencana Sesuai RPJMD 2016	Presentase Capaian Kinerja (%)
1	Angka kelulusan SD/MI	100 %	99,80 %	100 %	99,80
	SMP/MTS	96,88 %	99,83 %	99,86 %	99,96
	SMA/SMK/MA	98,94 %	98,84 %	99,92 %	98,91

Berdasarkan tabel di atas, capaian tahun 2014 di bandingkan dengan tahun lalu mengalami peningkatan untuk indikator angka kelulusan tingkat SMP/MTS sedangkan angka kelulusan untuk tingkat SD/MI dan SMA/SMK/MA mengalami penurunan dan capaian rencana sesuai RPJMD



rata-rata hamper mencapai target yang ditetapkan untuk rencana akhir 2016 atau telah mencapai capaian di atas 85%.

Sasaran 6 : Meningkatnya mutu dan kapasitas guru

Tabel 3.6
Evaluasi Pencapaian Sasaran 6

No	Indikator sasaran	Tahun 2014		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Presentase guru bersertifikasi	70 %	66%	94,28

Untuk capaian sasaran meningkatnya mutu dan kapasitas guru di Kota Ambon pada Tahun 2014 dengan indikator sasaran presentase guru bersertifikasi mencapai capaian 94,28%. Realisasi guru bersertifikasi di Tahun 2014 sebesar 66%, dari jumlah guru di Kota Ambon sebanyak 5.198 orang, yang telah memiliki sertifikat pendidik sebanyak 3.435 orang.

Realisasi capaian sasaran tahun lalu, tahun ini dan rencana sesuai tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Indikator Sasaran	Tahun 2013	Tahun 2014	Rencana Sesuai RPJMD 2016	Presentase Capaian Kinerja (%)
1	Presentase guru bersertifikasi	57 %	66 %	85 %	77,64

Berdasarkan tabel di atas, indikator sasaran presentase guru bersertifikasi di tahun 2014 mengalami peningkatan di dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 9% dan presentase capaian kinerja berdasarkan rencana sesuai RPJMD telah mencapai 77,64%.

Sasaran 7 : Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan

Tabel 3.7
Evaluasi Pencapaian Sasaran 7



No	Indikator sasaran	Tahun 2014		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Ratio ruang kelas : siswa			
	SD/MI	1:33	1:40	78
	SMP/MTS	1:34	1:40	82
	SMA/SMK/MA	1:36	1:40	88

Untuk sasaran meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan tahun 2014 dengan indikator sasaran ratio ruang kelas : siswa untuk tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK memiliki realisasi yang sama yaitu 1 : 40 dengan capaian belum mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya daya tampung siswa di Kota Ambon.

Yang menjadi permasalahan dalam membangun ruang kelas baru dan sekolah baru adalah sulitnya mendapatkan lahan pembangunan karena terbatasnya lahan kosong.

Untuk mengatasi hambatan tersebut Pemerintah Kota Ambon dalam hal ini Dinas Pendidikan terus berupaya untuk melakukan koordinasi dan konsultasi agar proses pembangunan dapat dilakukan sehingga pemenuhan akan kebutuhan akses pendidikan dapat teratasi.

Sasaran 8 : Peningkatan jangkauan layanan kesehatan

Tabel 3.9
Evaluasi Pencapaian Sasaran 8

No	Indikator sasaran	Tahun 2014		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Kecamatan dengan puskesmas rawat inap	60 %	20%	33,3%

Untuk sasaran peningkatan jangkauan layanan kesehatan di Kota Ambon mempunyai 1 indikator sasaran yaitu Kecamatan dengan puskesmas rawat inap, di Tahun 2014 belum mencapai target yang ditetapkan, dan realisasi hanya mencapai 20%. Dari 5 kecamatan yang



terdapat di Kota Ambon hanya terdapat 1 kecamatan yaitu kecamatan Leitimur Selatan yang telah memiliki puskesmas rawat inap dan sudah di operasionalkan. Sedangkan untuk puskesmas latuhalat di Kecamatan Nusaniwe, puskesmas Air Besar di Kecamatan Sirimau masih dalam proses pembangunan, sehingga diharapkan Tahun 2015 sudah dapat dioperasionalkan.

Sasaran 9 : Meningkatkan mutu layanan kesehatan

Tabel 3.10
Evaluasi Pencapaian Sasaran 9

No	Indikator sasaran	Tahun 2014		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Usia harapan hidup	73,45 tahun	73,03 tahun	99,42

Usia harapan hidup menggambarkan usia tertua yang bisa dicapai seorang penduduk untuk bertahan hidup. Kualitas penduduk yang baik adalah penduduk yang bisa mencapai usia harapan hidup yang panjang. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Ambon usia harapan hidup masyarakat Kota Ambon di Tahun 2014 mencapai 73,03 tahun dengan capaian 99,42%. Ini menunjukkan bahwa usia harapan hidup masyarakat Kota Ambon cukup tinggi.

Sasaran 10 : Tersedianya sarana dan prasarana air bersih

Tabel 3.11
Evaluasi Pencapaian Sasaran 10

No	Indikator sasaran	Tahun 2014		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah keluarga yang terlayani satuan sambungan air bersih	17.450	10.327	59,18

Dari tabel 3.11 di atas dapat dilihat indikator sasaran jumlah keluarga yang terlayani satuan sambungan air bersih di tahun 2014 mencapai



target 59,18% hal ini terjadi karena baru sebagian masyarakat yang menggunakan air bersih yang bersumber dari PDAM untuk memenuhi aktifitas sehari-hari mereka, sedangkan masih ada sebagian masyarakat yang lebih memilih menggunakan air bersih yang bersumber dari air tanah atau air pegunungan untuk memenuhi kebutuhan air bersih mereka. Berikut dapat dilihat jumlah pelanggan air bersih dan uang masuk pada perusahaan air minum DSA menurut konsumen di kota Ambon.

Tabel 3.21.1
Jumlah Pelanggan PDAM di Kota Ambon Menurut Jenis Konsumen

Jenis konsumen	Jumlah Pelanggan	Uang Masuk (Rp)
Sosial	287	244.629.650
Umum	190	-
Khusus	97	-
Non Niaga	10389	7.051.594.350
Rumah Tangga	10327	5.573.390.800
Instansi Pemerintah	62	1.478.203.550
Niaga	213	875.722.525
Kecil	203	-
Besar	10	-
Industri	2	-
Kecil	1	-
Besar	1	-
Khusus	1	-
Pelabuhan	1	-
Pertamina	-	-

Sumber : Perusahaan daerah air minum Kota Ambon, 2014

Sasaran 11 : Tersedianya sarana dan prasarana listrik

Tabel 3.12
Evaluasi Pencapaian Sasaran 11

No	Indikator Kinerja	Tahun 2014		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah produksi listrik per tahun	290 juta kwh	266 juta kwh	91,72

Sasaran tersedianya sarana dan prasarana listrik dengan indikator sasaran jumlah produksi listrik per tahun di tahun 2014 mencapai



capaian 91,72%.Kebutuhan listrik dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Tahun 2014 jumlah pelanggan listrik PLN sebanyak 95183 meningkat sebesar 2,18 persen dari tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut terbesar adalah pelanggan dari kecamatan Sirimau (42,42%) diikuti oleh kecamatan Teluk Ambon Baguala (27,48%) dan kecamatan Nusaniwe (18,55%). Dilihat dari jenis pelanggan, maka yang terbesar adalah pelanggan rumah tangga (91,91%) diikuti oleh bisnis (5,06%) dan sosial (2,12%). Sedangkan kalau dilihat dari nilai kwh terjual maka pemasukan terbesar berasal dari bisnis (46,30%) diikuti oleh rumah tangga (32,75%) dan pemerintah (12,64).

Berikut dapat dilihat perkembangan tenaga listrik yang diusahakan Perusahaan Listrik Negara di Kota Ambon.

Tabel 3.12.1

Perkembangan tenaga listrik yang diusahakan
Perusahaan Listrik Negara di Kota Ambon, 2010-2014

Tahun	Listrik Terjual (KWH)	Nilai KWH Terjual (Rp)	Faktor Beban (%)	Faktor Kapasitas (%)	Pelanggan
2010	200 602 191	153 782 205 520	57,06	32,47	63 590
2011	164 594 685	121 309 277 258	60,05	42,30	67 248
2012	192 072 596	137 804 084 335	64,97	32,53	83 031
2013	228 427 144	160 957 296 858	69,47	35,94	84 851
2014	266 136 423	195 775 730 049	75,75	30,91	95 183

Sasaran 12 : Tersedianya sarana dan prasarana telekomunikasi

Tabel 3.13
Evaluasi Pencapaian Sasaran 12

No	Indikator sasaran	Tahun 2014		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pelayanan internet kecamatan	60 %	60%	100



Indikator sasaran pelayanan internet kecamatan untuk tahun 2014 di Kota Ambon mencapai realisasi 60% atau capaian 100%. Berdasarkan data dari Kantor Pengolah Data Elektronik, 5 (lima) kecamatan yang terdapat di Kota Ambon baru 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Sirimau, Teluk Ambon Baguala dan Teluk Ambon yang telah dilayani internet. Sedangkan kecamatan Nusaniwe yang sebelumnya telah terpasang layanan internet untuk sementara telah terputus karena jaringan yang sering terganggu. Untuk kecamatan Leitimur Selatan sampai dengan saat ini belum bisa terjangkau oleh layanan internet karena lokasi kecamatan yang jauh sehingga sulit dalam jangkauan layanan internet.

Sasaran 13 : Meningkatkan sarana dan prasarana jalan

Tabel 3.14
Evaluasi Pencapaian Sasaran 13

No	Indikator Kinerja	Tahun 2014		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Rasio panjang jalan dalam kondisi baik	87 %	100%	114,94

Berdasarkan tabel 3.14 di atas sasaran meningkatnya sarana dan prasarana jalan memiliki indikator rasio panjang jalan dalam kondisi baik, dan indikator tersebut mencapai capaian di atas 100% atau bermakna sangat berhasil. Indikator ini dicapai melalui Program :

1. Pembangunan Jalan Dan Jembatan dengan 22 (dua puluh dua) kegiatan.
2. Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong dengan 6 (enam) kegiatan.
3. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan dengan 14 (empat belas) kegiatan.



Pada tabel di bawah ini dapat diketahui panjang jalan di Kota Ambon menurut pemerintahan yang berwenang, jenis permukaan dan kondisi jalan (m).

Tabel 3.14.1

Panjang jalan di Kota Ambon menurut pemerintahan yang berwenang, jenis permukaan dan kondisi jalan (m)

Uraian	Jalan Nasional	Jalan Propinsi	Jalan Kota
I. Jenis Permukaan			
- Hotmix	42829	38687	201820
- Lapen	-	-	59150
- Rabat Beton	-	-	2270
- Kerikil	-	-	4290
- Tanah	-	-	4050
II. Kondisi Jalan			
- Baik	40678	28356	229750
- Sedang	-	-	13800
- Rusak ringan	1681	10331	14300
- Rusak berat	470	-	13730

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon, 2014

Realisasi capaian sasaran tahun lalu, tahun ini dan rencana sesuai tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Indikator Sasaran	Tahun 2013	Tahun 2014	Rencana Sesuai RPJMD 2016	Presentase Capaian Kinerja (%)
1	Rasio panjang jalan dalam kondisi baik	100 %	100 %	90 %	111

Berdasarkan tabel di atas, capaian rasio panjang jalan dalam kondisi baik di tahun 2014 di bandingkan dengan tahun lalu tidak mengalami peningkatan dengan realisasi 100% dan rencana sesuai RPJMD telah melampaui target yang ditetapkan untuk rencana akhir 2016 atau telah mencapai capaian 111%.



Sasaran 14 : Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan kawasan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah

Tabel 3.15
Evaluasi Pencapaian Sasaran 14

No	Indikator sasaran	Tahun 2014		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	75 %	75 %	100

Berdasarkan tabel di atas untuk indikator sasaran kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW telah mencapai 100%. Hal ini dapat terjadi karena dalam menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap penataan ruang, Pemerintah Kota Ambon terus melakukan upaya pengendalian pemanfaatan ruang melalui penertiban bangunan yang bukan peruntukan, perizinan yang berbasis arahan RTRW Kota Ambon 2011-2031 serta melakukan sosialisasi tata ruang kepada masyarakat. Pada tahun 2014, pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW telah mencapai 75%, diukur melalui luas pemanfaatan ruang yang dilaksanakan dibanding dengan jumlah kesesuaian arahan peruntukan ruang pada kawasan dimaksud. Luas ruang laut dan darat di Kota Ambon adalah 377 km², luas wilayah yang telah sesuai pemanfaatan ruang sesuai tutupan laha adalah 282,75 km² atau 75%.

Sasaran 15 : Berkurangnya kawasan kumuh di perkotaan

Tabel 3.16
Evaluasi Pencapaian Sasaran 15

No	Indikator Kinerja	Tahun 2014		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Luas kawasan kumuh	103 Ha	94,51 Ha	108,24



Luas kawasan kumuh di Kota Ambon untuk tahun 2014 telah berkurang 8,49% dari 103 Ha menjadi 94,51Ha. Berkurangnya kawasan kumuh berada pada kelurahan wainitu, kelurahan seilale dan kelurahan waihaong. Ini disebabkan karena intervensi Program Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (P2LPKBK) oleh kementerian Perumahan Rakyat, yang sebagian besar berupa penataan drainase.

Sasaran 16 : Tertatanya sistem transportasi masyarakat

Tabel 3.17
Evaluasi Pencapaian Sasaran 16

No	Indikator sasaran	Tahun 2014		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	LOAD faktor angkutan umum	67,50%	99%	146,6

Untuk indikator sasaran LOAD faktor angkutan umum atau mengetahui balance antara jumlah angkutan kota (suplay) dan pengguna jasa angkutan kota (demand), maka dapat dilihat berdasarkan tabel di atas bahwa capaiannya sangat berhasil. Itu berarti kondisi antara jumlah angkutan kota dengan pengguna jasa angkutan kota sudah seimbang. Di Kota Ambon jumlah angkutan kota yang sudah terdata pada dinas perhubungan Kota Ambon adalah sebanyak 1700 unit, sedangkan jumlah pemakai jasa angkutan kota adalah 36,640.000/ tahun.

Sasaran 17 : Meningkatnya pelayanan persampahan

Tabel 3.18
Evaluasi Pencapaian Sasaran 17

No	Indikator Kinerja	Tahun 2014		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Cakupan pelayanan sampah masyarakat	65%	70%	107,69%



Berdasarkan evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan persampahan dengan indikator cakupan pelayanan sampah masyarakat di Tahun 2014 mencapai capaian 107,69% atau bermakna sangat berhasil. Secara administratif luas wilayah Kota Ambon adalah 337 km² dengan luas daratan 359,45 km² berpenduduk ± 388.000 jiwa dari luas wilayah tersebut. Selama ini operasional penanganan persampahan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon menjangkau kawasan pemukiman sepanjang 225,7 km² atau 62,79% dari luas daratan Kota Ambon dengan penduduk terlayani sebanyak ± 350.182 jiwa atau 90,25% dari jumlah penduduk Kota Ambon.

Selama tahun 2013, jumlah produksi sampah dari wilayah pelayanan adalah sebanyak 1.064,19 M³ dan yang terangkut ± 1.093,4 M³. Sedangkan pada tahun 2014 jumlah produksi sampah dari wilayah pelayanan adalah sebanyak 1.134 M³ dan yang terangkut ± 794 M³ atau 70%. Dibandingkan dengan tahun 2013 terjadi peningkatan volume produksi sampah sebesar 5% di tahun 2014.

Hambatan yang dihadapi dalam penanganan cakupan pelayanan sampah kepada masyarakat di Kota Ambon adalah :

- Jumlah produksi volume sampah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan
- Walaupun jumlah armada kendaraan operasional kebersihan setiap tahunnya dilakukan penambahan, tetapi masih belum mencukupi untuk melayani semua wilayah Kota Ambon
- Ada beberapa wilayah yang karena keadaan geografisnya sulit dijangkau oleh kendaraan operasional kebersihan, menyebabkan



tidak dapat dilakukan pelayanan sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon

- Terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia

Dalam mengatasi hambatan yang ada, telah dilakukan langkah-langkah penyelesaian yaitu :

- Memaksimalkan armada kendaraan operasional kebersihan, dimana sebagian besar kendaraan operasional kebersihan melayani 2 jalur pengangkutan sampah, selain itu juga dipakai untuk pengangkutan sampah spul pada siang hari dan kerja ekstra pengangkutan sampah.
- Melakukan pengadaan gerobak sampah dan kliko untuk dibagikan kepada masyarakat/ kelompok masyarakat dalam mengangkut sampah dari rumah ke rumah menuju ke tempat sampah (TPS) dimana kendaraan operasional kebersihan dapat menjangkanya.
- Mengusulkan penambahan anggaran pada kegiatan kerja ekstra.

Realisasi capaian sasaran tahun ini dan rencana sesuai tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Indikator Sasaran	Tahun 2014	Rencana Sesuai RPJMD 2016	Presentase Capaian Kinerja (%)
1	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	75 %	75 %	100 %
2	Luas kawasan kumuh	94,51 %	75 ha	73 %
3	Load faktor angkutan umum	99 %	70,00 %	141 %
4	Cakupan pelayanan sampah masyarakat	70 %	90%	77 %

Berdasarkan tabel di atas, presentase capaian indikator sasaran kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW dan indikator Load faktor angkutan umum di tahun 2014 sesuai rencana RPJMD telah mencapai target yang ditetapkan untuk rencana akhir 2016 sedangkan untuk



indikator luas kawasan kumuh dan indikator cakupan pelayanan sampah masyarakat masih mencapai 73% dan 77%.

Sasaran 18 : Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan

Tabel 3.19
Evaluasi Pencapaian Sasaran 18

No	Indikator sasaran	Tahun 2014		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah penduduk ber KTP terhadap jumlah penduduk wajib KTP	80 %	56,51%	70,63

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan pada tahun 2014 sudah menunjukkan hasil baik. Dari jumlah wajib KTP sebanyak 319.210, target pencetakan KTP Tahun 2014 adalah sebanyak 255.368 KTP atau 80%. Namun sampai dengan akhir Desember 2014 baru terealisasi sebanyak 180.380 KTP atau 56,51%.

Hal ini disebabkan karena kewenangan pencetakan KTP Elektronik sampai dengan Tahun 2014 masih terpusat di Jakarta (amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan. Penyerahan kewenangan pencetakan KTP elektronik kepada Kabupaten/Kota sesuai amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mulai dilaksanakan tahun 2015, sehingga diharapkan semua penduduk dapat memiliki KTP.

Sasaran 19 : Meningkatnya peserta KB aktif bagi pasangan usia subur

Tabel 3.20
Evaluasi Pencapaian Sasaran 19



No	Indikator Kinerja	Tahun 2014		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah peserta KB aktif terhadap jumlah PUS	80%	72,62%	90,77%

Pencapaian sasaran meningkatnya peserta KB aktif bagi pasangan usia subur di tahun 2014 mencapai 90,77% atau sangat berhasil. Realisasi ini didasarkan pada Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 43.709 PUS dengan Pencapaian Peserta KB Aktif 31.744 Akseptor dari target sebesar 25.395 pada Tahun 2014, sehingga realisasi jumlah peserta KB aktif terhadap jumlah PUS 72,62%, adapun Kegiatan yang dilakukan untuk mendorong keberhasilan Capaian Kinerja tersebut adalah:

1. Program Keluarga Berencana
2. Program Pelayanan Kontrasepsi
3. Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Mandiri
4. Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Pembinaan Posyandu

Berikut dapat dilihat pada tabel target dan realisasi akseptor aktif di Kota Ambon menurut jenis kontrasepsi

Tabel.3.19.1

Target dan realisasi akseptor aktif di Kota Ambon menurut Jenis Kontrasepsi

Jenis Kontrasepsi	Target	Realisasi	Persentase
IUD	1056	2420	229,17
PIL	2859	10167	355,61
Kondom	1325	1672	126,19
Operasi	1477	1644	111,31
Suntikan	7012	16378	233,57
Susuk (Implan)	2500	2730	109,20
Obat Vaginal	-	-	-

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Ambon, 2014



Sasaran 20 : Meningkatnya ruang terbuka hijau

Tabel 3.21
Evaluasi Pencapaian Sasaran 20

No	Indikator sasaran	Tahun 2014		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Ratio ruang terbuka hijau	17%	16%	94,11

Dari tabel di atas untuk indikator ratio ruang terbuka hijau mencapai capaian 94,11% di tahun 2014. Sampai tahun 2013 luas ruang terbuka hijau di Kota Ambon seluas 26.838 M² atau 15% dari jumlah ruang terbuka hijau (RTH) yang dibutuhkan. Sedangkan pada tahun 2014, luas ruang terbuka hijau (RTH) yang tersedia sudah mencapai 27.395 M² atau 16% dari yang dibutuhkan sedangkan target yang ingin dicapai pada tahun 2014 adalah 17%. Penyediaan ruang terbuka hijau pada tahun 2014 tidak dapat mencapai target oleh karena terbatasnya lahan yang akan digunakan untuk membuat RTH, sehingga yang dapat terlaksana hanya seluas ± 559 M² saja.

Hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator ratio ruang terbuka hijau adalah :

- Sulitnya menyediakan lahan yang akan dibuat sebagai ruang terbuka hijau
- Terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan atau hambatan yang ada adalah :

- Memindahkan lokasi pembuatan ruang terbuka hijau dari lokasi yang dilarang oleh balai jalan
- Mengadakan kerjasama dengan pihak lain (Pertamina Poka) untuk membuat taman di depan Pertamina Poka dengan anggaran



perencanaannya dibebankan kepada Pemerintah Kota Ambon dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan sedangkan anggaran untuk pembuatan fisik taman dan pengawasannya dibebankan kepada pertamina.

Sasaran 21 : Tersedianya peraturan daerah yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Tabel 3.22
Evaluasi Pencapaian Sasaran 21

No	Indikator Sasaran	Tahun 2014		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Perda tentang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	2 bh	1	50

Tersedianya peraturan daerah yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator sasaran, Peraturan daerah tentang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, sampai dengan tahun 2014 baru terdapat 1 buah Peraturan daerah yaitu Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perda ini merupakan Perda inisiatif dari lembaga DPRD Kota Ambon. Sedangkan untuk tahun 2014 belum ada tambahan penetapan Perda tentang Lingkungan Hidup. Berikut Peraturan Daerah yang ditetapkan pada Tahun 2014, yaitu :

1. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2014 tentang APBD Kota Ambon Tahun 2014
2. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas-dinas Kota Ambon



3. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga teknis Kota Ambon
4. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
5. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2014 tentang pembentukan dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A
6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2014 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Ambon
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2014 tentang penyertaan modal Pemerintah Kota Ambon kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2014 tentang penyertaan modal Pemerintah Kota Ambon kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2014 tentang sistem kesehatan daerah
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2014 tentang penataan pedagang kaki lima
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2014 tentang pertanggungjawaban APBD 2013
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2014 tentang perubahan APBD tahun anggaran 2014



Realisasi capaian sasaran tahun ini dan rencana sesuai tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Indikator Sasaran	Tahun 2014	Rencana Sesuai RPJMD 2016	Presentase Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah penduduk ber KTP terhadap jumlah penduduk wajib KTP	56,51%	85 %	66,48
2	Jumlah peserta KB aktif terhadap jumlah PUS	72,62%	80%	90,77
3	Ratio ruang terbuka hijau	16%	19%	84,21
4	Perda tentang pengelolaan alam dan lingkungan hidup	1 bh	5 bh	20

Berdasarkan tabel di atas, presentase capaian indikator sasaran perda tentang pengelolaan alam dan lingkungan hidup sampai dengan tahun 2014 masih belum mencapai 50% sesuai rencana RPJMD 2016 sedangkan untuk indikator lainnya telah mencapai capaian di atas 50% sesuai RPJMD 2016.

Sasaran 22 : Meningkatnya usaha UMKM dan koperasi

Tabel 3.23
Evaluasi Pencapaian Sasaran 22

No	Indikator Kinerja	Tahun 2014		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pertumbuhan UMKM dan koperasi	7,5 %	15%	200

Pertumbuhan UMKM dan koperasi di Kota Ambon selama tahun 2014 mencapai capaian 200%. Dari target 20 koperasi yang dibentuk, terealisasi 3 koperasi atau 15%. Hasil pembinaan dan pengembangan koperasi tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun 2013, menggambarkan bahwa :

- Dinamika kelembagaan koperasi masih dibutuhkan langkah-langkah strategis agar dapat tercapai kinerja yang lebih baik, karena faktanya masih ada 125 koperasi yang tidak aktif atau 16,78% dari 745



jumlah koperasi yang berbadan hukum pada tahun 2014. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan pengelola koperasi.

- Indikator lain dari dinamika kelembagaan koperasi adalah pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) belum terlaksana secara optimal karena hanya sebanyak 46 unit atau 7,46% dari 617 koperasi wajib RAT tahun 2014, dimana terjadi penurunan sebanyak 48 unit atau 35,38% dari tahun 2013 sebanyak 130 unit.

Berikut dapat dilihat data perkembangan koperasi di Kota Ambon.

Tabel 3.23.1

Perkembangan koperasi di Kota Ambon Tahun 2013-2014

No	Variabel	Tahun		Trend	Presentase
		2013	2014		
1	Jumlah Koperasi	742	745	3	0,40%
2	Aktif	617	620	3	0,48%
3	Tidak aktif	125	125	-	0,00%
4	Jumlah anggota	52.815	56.950	4.135	7,26%
5	Calon anggota	3.070	3.072	2	0,07%
6	Pengurus	2.633	2.642	9	0,34%
7	Pengawas	1.260	1.267	7	0,55%
8	BPP KUD	16	16	-	0,00%
9	Manajer	414	416	2	0,48%
10	Karyawan	1.960	1.987	27	1,36%

Tabel 3.23.2

Perkembangan sebaran koperasi Tahun 2013-2014

No	Kecamatan	Tahun		Trend	Presentase
		2013	2014		
1	Sirimau	393	396	3	0,76%
2	Nusaniwe	191	191	-	0,00%
3	T.A.Baguale	85	85	-	0,00%
4	Teluk Ambon	62	62	-	0,00%
5	Leitimur Selatan	11	11	-	0,00%
Jumlah		742	745	3	0,40%



Sasaran 23 : Meningkatnya kesempatan kerja

Tabel 3.24
Evaluasi Pencapaian Sasaran 23

No	Indikator sasaran	Tahun 2014		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Penyerapan tenaga kerja sektor UMKM dan koperasi	25 %	25%	100

Berdasarkan data pada tabel di atas, indikator sasaran penyerapan tenaga kerja sektor UMKM dan koperasi di tahun 2014 mencapai capaian 100%. Hal ini diketahui dari diklat kewirausahaan bagi sarjana wirausaha yang merupakan bagian dari upaya transformasi *mindset* para lulusan perguruan tinggi agar berpikir dan berupaya menciptakan kesempatan kerja bagi dirinya dan orang lain dan tidak selalu menjadi pencari kerja. Upaya ini diharapkan dapat berkontribusi mengatasi masalah pengangguran. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober s/d 10 Oktober di Rinamakana Jl.Pattimura Ambon dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing sehingga mampu menciptakan lapangan kerja serta kesempatan kerja bagi masyarakat di Kota Ambon dan dapat meningkatkan pendapatan usahanya.

Sasaran 24 : Meningkatkan pendapatan masyarakat

Tabel 3.25
Evaluasi Pencapaian Sasaran 24

No	Indikator sasaran	Tahun 2014		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pendapatan perkapita masyarakat	6,3 juta	5,2 juta	82,53



Sasaran meningkatkan pendapatan masyarakat dengan indikator sasaran pendapatan perkapita masyarakat di Tahun 2014, mencapai capaian 82,53% atau bermakna sangat berhasil. Secara tidak langsung, Pendapatan Per Kapita menggambarkan tingkat kemakmuran satu negara atau daerah. Sesuai dengan konsep dan definisi, pengertian Pendapatan per Kapita suatu daerah adalah Pendapatan Regional Daerah tersebut dibagi dengan jumlah penduduk daerah tersebut pertengahan tahunnya. Sampai saat ini dalam penghitungan Pendapatan Regional Kabupaten dan Kota di Indonesia, umumnya masih hanya sebatas Pendapatan Domestik Regional, sehingga angka Pendapatan perkapita yang disajikan di sini adalah angka Pendapatan Domestik Regional per kapita.

Selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, Pendapatan Domestik Regional per kapita Kota Ambon dalam penghitungan atas dasar harga berlaku selalu mengalami peningkatan. Dengan jumlah penduduk pertengahan tahun 2014 Kota Ambon sebanyak 379,62 ribu jiwa, maka diperoleh Pendapatan Domestik Regional per kapita Kota Ambon tahun 2014 yang dihitung atas dasar harga berlaku sebesar 14,6 juta rupiah setahun. Terjadi peningkatan sebesar 1,4 juta rupiah dari tahun sebelumnya atau setara dengan 10,54 persen. Nilai pendapatan per kapita tersebut bukanlah merupakan nilai riil yang diterima oleh setiap penduduk Kota Ambon, karena ada juga pelaku ekonomi yang bukan merupakan penduduk asli Kota Ambon tetapi menjadi pelaku ekonomi di wilayah Kota Ambon. Begitu pula sebaliknya, penduduk asli Kota Ambon ada yang menjadi pelaku ekonomi di luar wilayah Kota Ambon.

Namun dalam penghitungan atas dasar harga konstan, Pendapatan Domestik Regional per kapita Kota Ambon cenderung berfluktuasi.



Terakhir pada tahun 2014 tercatat sebesar Rp.5.260.001,00, lebih rendah dibandingkan pendapatan perkapita pada sebelumnya yang tercatat sebesar Rp.5.287.018,00, atau bahkan pada tahun 2010 yang tercatat sebesar Rp.5.593.412,00. Dapat diartikan bahwa 14,6 juta rupiah yang diterima tiap penduduk Kota Ambon pada tahun 2014 adalah setara dengan 5,26 juta rupiah pada tahun 2000.

Sasaran 25 : Meningkatkan produktivitas industri pengolahan berbasis perikanan, kelautan, pertanian, perkebunan dan peternakan serta pariwisata

Tabel 3.26
Evaluasi Pencapaian Sasaran 25

No	Indikator sasaran	Tahun 2014		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya proporsi sektor industry terhadap PDRB	2,75 %	2,75	100
2.	Angka kunjungan wisatawan	550 orang	5162 orang	938

Untuk indikator sasaran angka kunjungan wisatawan di Kota Ambon Tahun 2014, jauh melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk tahun 2014 jumlah kunjungan wisatawan asing di Kota Ambon sebanyak 5162 orang sehingga realisasi capaian sebesar 938%. Berikut dapat dilihat jumlah kunjungan wisatawan asing di Kota Ambon.

Tabel 3.26.1
Jumlah kunjungan wisatawan asing di Kota Ambon

No	Negara Asal	Wisatawan (orang)
1	Belanda	538
2	Australia	77
3	China	108
4	USA	333
5	Korea	89



6	Jerman	222
7	India	7
8	Inggris	124
9	Jepang	154
10	Perancis	203
11	Lain-lain	3307
	Total	5162

Realisasi capaian sasaran tahun ini dan rencana sesuai tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Indikator Sasaran	Tahun 2014	Rencana Sesuai RPJMD 2016	Presentase Capaian Kinerja (%)
1	Pertumbuhan UMKM dan Koperasi	15%	7,5%	200
2	Penyerapan tenaga kerja sektor UMKM dan Koperasi	25%	25%	100
3	Pendapatan perkapita masyarakat	5,2 juta	6,9 juta	75,36
4	Meningkatnya proporsi sektor industry terhadap PDRB	2,75%	3,50%	78,57
5	Angka kunjungan wisata mancanegara	5162 orang	650 orang	794

Berdasarkan tabel di atas, presentase capaian indikator sasaran pertumbuhan UMKM dan Koperasi, penyerapan tenaga kerja sektor UMKM dan Koperasi serta angka kunjungan wisata mancanegara di tahun 2014 di bandingkan rencana RPJMD 2016 telah mencapai target yang ditetapkan sedangkan untuk indikator pendapatan perkapita masyarakat dan meningkatnya proporsi sektor industry terhadap PDRB baru mencapai rata-rata 70% dari rencana sesuai RPJMD 2016.

Sasaran 26 : Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat

Tabel 3.26
Evaluasi Pencapaian Sasaran 26

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2014
----	-------------------	--------	------------



			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Gangguan Kamtibmas	Kasus	700	711	101,57

Berdasarkan data pada tabel 3.26 di atas indikator sasaran gangguan kamtibmas di Kota Ambon pada tahun 2014 sebanyak 711 kasus, dengan capaian 101,57%. Gangguan kamtibmas di tahun 2014 menurun sebesar 32% di banding tahun 2013 sebanyak 1037 kasus. Berikut dapat dilihat data banyaknya pelaku gangguan kamtibmas di Kota Ambon yang ditangani Polres P.Ambon dan P.P.Lease.

Tabel 3.26.1

Banyaknya pelaku gangguan kamtibmas di Kota Ambon yang dilayani Polres P.Ambon dan P.P.Lease menurut Bulan dan Jenis Kelamin

Bulan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Januari	38	1	39
Pebruari	57	-	57
Maret	60	2	62
April	70	7	77
Mei	52	1	53
Juni	48	1	49
Juli	65	1	66
Agustus	56	-	56
September	51	-	51
Oktober	56	3	59
Nopember	67	2	68
Desember	72	1	74
Jumlah	692	19	711

Sasaran 27 : Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya lokal

Tabel 3.27
Evaluasi Pencapaian Sasaran 27

No	Indikator sasaran	Tahun 2014
----	-------------------	------------



		Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pagelaran seni dan budaya lokal dalam 1 tahun	15 kali	15 kali	100

Sasaran meningkatnya pengelolaan seni dan budaya lokal dengan indikator sasaran pagelaran seni dan budaya lokal dalam 1 tahun mencapai capaian 100% di Tahun 2014. Untuk meningkatkan kualitas sanggar seni maka setiap bulan dilakukan festival pagelaran seni dan budaya yang melibatkan sanggar-sanggar di Kota Ambon oleh dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Ambon.

Kegiatan yang dilakukan merupakan kerjasama dengan beberapa pihak diantaranya dengan event organizer yang mengkolaborasikan tarian tradisional dan modern, Dinas Pendapatan pada saat pengundian bill makan restoran, Ameks Samra untuk festival bernuansa keagamaan pengembangan dan pelestarian budaya pela gandong. Disamping itu pula yang menjadi jadwal rutin adalah Harmoni sudut kota, yang bertujuan mengembangkan pelestarian budaya tradisional, mengembangkan minat dan bakat kawula muda akan seni music pada kegiatan harmoni sudut kota dan mewujudkan Kota Ambon sebagai *city of music*

Sasaran 28 : Terwujudnya penegakan dan pengembangan hukum secara adil dan bertanggungjawab

Tabel 3.29
Evaluasi Pencapaian Sasaran 28

No	Indikator Kinerja	Tahun 2014		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum	45	30	66,6

Sasaran terwujudnya penegakan dan pengembangan hukum secara adil dan bertanggungjawab dengan indikator sasaran tingkat kepuasan



masyarakat terhadap penegakan hukum di tahun 2014 tidak mencapai target yang ditetapkan dengan tingkat capaian 66,6%. Hal ini terlihat dari jumlah perkara yang masuk sebanyak 1.258 perkara sedangkan yang diselesaikan hanya 388 perkara atau sebesar 30%.

Hal ini disebabkan karena aparat penegak hukum masih belum serius dalam menanggapi tiap perkara yang masuk, kinerja yang menurun dari aparat penegak hukum membuat masyarakat menjadi resah dan dampaknya tingkat kepercayaan masyarakat menjadi berkurang. Berikut dapat dilihat banyaknya perkara dan tahanan pada Kejaksaan negeri Ambon.

Tabel 3.29.1

Banyaknya perkara dan tahanan pada Kejaksaan Negeri Ambon

Perkara dan Tahanan	Pidana Umum	Pidana Korupsi	Pidana Khusus Lainnya	Jumlah
Perkara masuk	1.235	8	15	1.258
Diselesaikan	370	8	10	388
Sisa	865	-	5	870
Tahanan masuk	427	-	73	500
Diselesaikan	427	-	47	474
Sisa	-	-	26	26

Sumber : Kantor Kejaksaan Negeri Ambon, 2014

Realisasi capaian sasaran tahun ini dan rencana sesuai tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Indikator Sasaran	Tahun 2014	Rencana Sesuai RPJMD 2016	Presentase Capaian Kinerja (%)
1	Gangguan kamtibmas	711	500 kasus	142,2
2	Pagelaran seni dan budaya lokal dalam 1 tahun	15	20 kali	75
3	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum	30	50%	60

Berdasarkan tabel di atas, presentase capaian indikator sasaran gangguan kamtibmas di tahun 2014 sesuai rencana RPJMD telah



mencapai target yang ditetapkan untuk rencana akhir 2016 sedangkan untuk indikator pagelaran seni dan budaya lokal dalam 1 tahun dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum masih mencapai 75% dan 60% dari rencana sesuai RPJMD 2016

3.2 Realisasi Anggaran

Mencermati kecenderungan perkembangan belanja daerah, serta makin mendesaknya kebutuhan pelayanan publik seiring dengan makin kondusifnya kondisi Kota Ambon paska konflik yang memungkinkan percepatan pembangunan, maka pengelolaan keuangan daerah harus dapat diarahkan untuk menunjang kegiatan pembangunan. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kinerja Pemerintah Kota Ambon tahun 2014, maka kinerja aspek finansial terkait dengan anggaran rutin dan pembangunan perlu dilakukan pengukuran, evaluasi dan analisis terhadap capaian kerjanya. Ikhtisar laporan realisasi anggaran yang merupakan akuntabilitas keuangan dapat digambarkan sebagai berikut :

APBD Kota Ambon tahun 2014 sebesar Rp.971.879.959.575,00 dengan rincian realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp.960.335.940.508,09 dan realisasi belanja sebesar Rp.898.824.190.351,70

Kebijakan pengelolaan keuangan Kota Ambon di arahkan kepada:

- a. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi sesuai Kepmendagri Nomor 130-67 Tahun 2000 tentang Pengakuan Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Kota.
- b. Mengoptimalkan pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (perusahaan milik daerah) serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- c. Mengintensifkan upaya-upaya peningkatan PAD melalui penggalan sumber-sumber alternatif dan kerjasama.



- d. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai konteks kebutuhan setiap tahapan atau periodisasi pembangunan.
- e. Mengintensifkan investasi pembangunan pada sektor-sektor produktif yang berimplikasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- f. Mengoptimalkan pengawasan melekat secara intensif terhadap kebijakan keuangan, perbaikan sistem pelayanan, dan penegakan aturan dalam rangka meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan.
- g. Mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam seluruh bidang pembangunan terkait dengan aspek pembiayaan.

1) Target dan realisasi Pendapatan

Realisasi perkembangan Pendapatan Kota Ambon selama tahun 2013-2014 dapat dilihat pada tabel 3.46 berikut :

Tabel 3.30

Perkembangan Pendapatan Kota Ambon Tahun 2013-2014

Uraian	Tahun			
	2013		2014	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
PENDAPATAN	864.995.153.964,71	847.935.916.421,14	949.999.050.046,35	960.335.940.508,09
-Pendapatan Asli Daerah	74.938.514.893,71	65.497.285.977,14	81.565.385.011,35	107.061.088.837,09
-Dana Perimbangan	637.113.199.416,00	636.119.699.442,00	676.959.186.175,00	683.398.076.154,00
-Lain-lain pendapatan yang sah	152.943.439.655,00	146.318.931.002,00	191.474.478.860,00	169.876.775.517,00

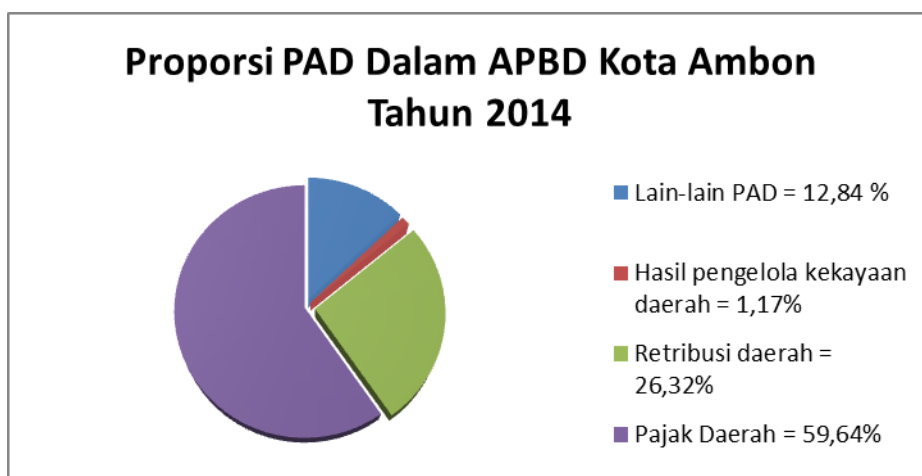
Sumber : Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon, 2014

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Ambon tahun 2013 - 2014, pendapatan Pemerintah Kota Ambon meningkat di tahun 2014 dibandingkan tahun 2013. Target Pendapatan Daerah Tahun 2014, dianggarkan sebesar Rp.949,999 milyar meningkat menjadi Rp.960,335 milyar. Sampai dengan tahun 2014, sumbangan terbesar pendapatan daerah berasal dari Dana Perimbangan. Pada tahun 2014, pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan ditargetkan

sebesar Rp.676,959 milyar atau sebesar 71% dari pendapatan daerah, meningkat menjadi Rp.683,398 milyar atau sebesar 71% dari total pendapatan daerah. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi sumber utama penerimaan daerah, belum mampu memberikan kontribusi secara proporsional terhadap penerimaan daerah. Pada tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp.81,565 milyar atau 8,58% dari penerimaan daerah. Target pendapatan daerah dari Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan menjadi Rp.107,061 milyar atau 11,14% dari penerimaan daerah. Selain itu, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah pada tahun 2014 ditargetkan Rp.191,474 milyar (20,15%), menurun menjadi Rp.169,876 milyar atau 17,68% dari penerimaan daerah.

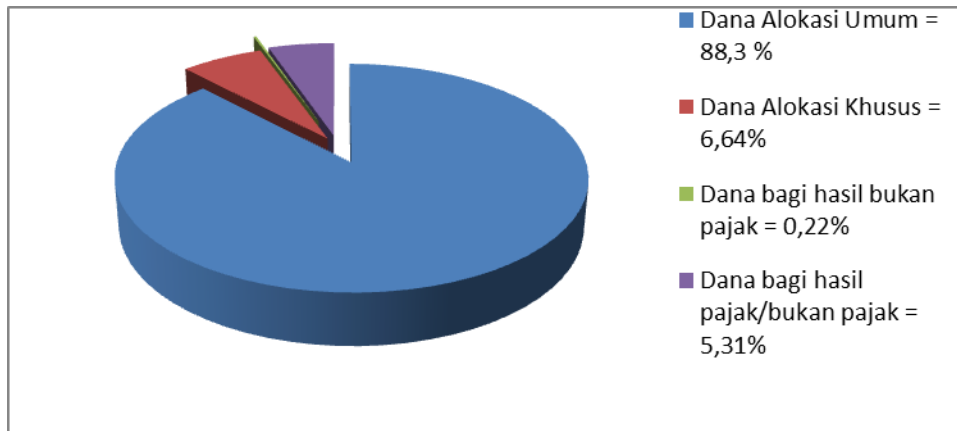
a. Pendapatan Asli daerah

Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari Penerimaan Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang dapat digambarkan sebagai berikut :



b. Dana Perimbangan

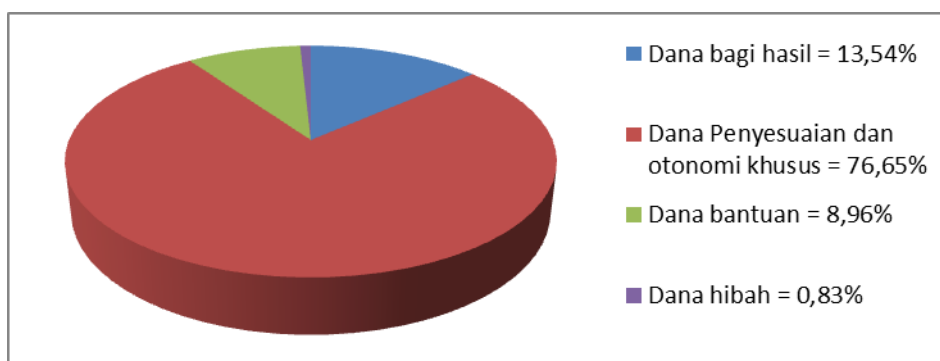
Dana perimbangan menjadi salah satu komponen yang cukup penting bagi APBD Kota Ambon. Adapun proporsi sumber-sumber Dana Perimbangan dapat dilihat pada gambar berikut :



Proporsi Sumber Dana Perimbangan Dalam APBD Kota Ambon Tahun 2014

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Sumber penerimaan lainnya berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah yang terdiri atas penerimaan dari Pemerintah Provinsi Maluku dan Penerimaan dari Pemerintah Pusat. Adapun proporsinya dapat dilihat pada gambar berikut ;



2) Target dan Realisasi Belanja

Pemenuhan kebutuhan publik yang terus meningkat dari tahun ke tahun telah berimplikasi terhadap alokasi belanja daerah Pemerintah Kota Ambon. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Ambon tahun 2013 – 2014, menunjukkan bahwa perkembangan belanja



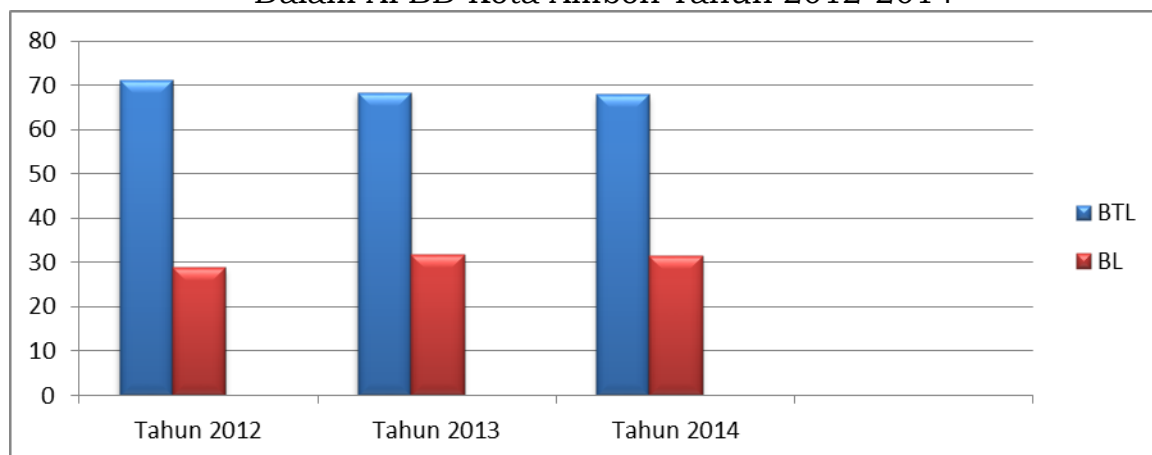
Pemerintah Kota Ambon terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.31
Perkembangan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2013-2014

Uraian	2013		2014	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Belanja Daerah	870.747.059.102,15	839.202.307.572,90	971.879.959.575,00
-Belanja tidak Langsung	597.682.902.722,00	572.846.595.019,00	617.352.718.125,00	611.020.651.960,70
-Belanja Langsung	273.064.156.380,15	266.355.712.553,90	354.527.241.450,00	282.635.183.224,00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon, 2014

Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Dalam APBD Kota Ambon Tahun 2012-2014



	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
■ BTL (%)	71,13	68,26	67,97
■ BL (%)	28,87	31,74	31,44

Target Belanja Daerah Kota Ambon tahun 2013 dianggarkan sebesar Rp.870,747 milyar meningkat menjadi sebesar Rp.971,879 milyar di tahun 2014. Realisasi Belanja Daerah menunjukkan terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2013, realisasi Belanja Daerah adalah sebesar Rp.839,202 milyar, meningkat menjadi Rp.898,824 milyar. Pada tahun 2014 terjadi penurunan proporsi Belanja Tidak Langsung namun masih di atas 50% dan hal ini diakibatkan oleh adanya peningkatan



Belanja Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Ambon sebagai konsekuensi dari kenaikan gaji PNS sebesar 6% pada tahun 2014 yang tidak ditunjang oleh kenaikan penerimaan dari dana perimbangan (DAU) dan Belanja Bantuan dan Hibah yang digolongkan sebagai Belanja Tidak Langsung pada PPKD.

3) Kondisi Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Perkembangan Pembiayaan Kota Ambon dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun	Penerimaan	Pengeluaran
2011	8.639.558.697,57	22.855.852.763,96
2012	34.164.732.077,14	12.965.390.631,81
2013	10.751.905.137,00	5.000.000.000,00
2014	24.324.113.675,03	2.697.118.049,94

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon, 2014

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat.



BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari LAKIP Pemerintah Kota Ambon Tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Ambon telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2014 sasaran sebagaimana tertuang dalam Keputusan Walikota Ambon Nomor 144 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama berjumlah 28 sasaran dengan 39 indikator yang terdiri dari 3 indikator untuk Misi 1, 19 indikator untuk misi 2, 4 indikator



untuk misi 3, 2 indikator untuk misi 4, 2 indikator untuk misi 5, 5 indikator untuk misi 6, 2 indikator untuk misi 7 dan 1 indikator untuk misi 8.

Dari 28 sasaran 59,12% telah dapat direalisasikan dengan baik, sedangkan 40,88% belum terealisasi. Namun secara umum rata-rata capaian indikator yang belum terealisasi telah mencapai capaian di atas 85%. Keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2014 pada hakekatnya karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, dan hasil kerja sama yang baik dari seluruh lapisan masyarakat Kota Ambon. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 92 indikator sasaran, disimpulkan bahwa:

Pertama, Indikator sasaran pada Misi I, terdiri atas 3 indikator dengan realisasi 3 indikator telah mencapai 100% atau melampaui target yang ditetapkan. *Kedua*, indikator sasaran pada misi II berjumlah 20 indikator kinerja dengan realisasi ketercapaian sebanyak 6 indikator kinerja atau 30% dan 70% belum/ tidak tercapai atau sebanyak 14 indikator kinerja. Namun belum atau tidak tercapai dari 14 indikator yang ada rata-rata di atas capaian 85% atau tetap bermakna sangat berhasil *Ketiga*, indikator sasaran pada misi III yang berjumlah 4 indikator kinerja dengan persentase pencapaian sasaran sebanyak 4 indikator atau 100%. *Keempat*, indikator sasaran pada misi IV yang berjumlah 2 indikator kinerja dengan persentase pencapaian sasaran 2 indikator belum mencapai target yang ditetapkan. *Kelima*, indikator sasaran pada Misi V yang berjumlah 2 indikator kinerja dengan presentase pencapaian sasaran sebanyak 2 indikator belum mencapai target yang ditetapkan. *Keenam*, indikator sasaran pada Misi VI berjumlah 5 indikator kinerja dengan



realisasi ketercapaian sebanyak 4 indikator kinerja atau 80% dan 20% belum/tidak tercapai atau sebanyak 1 indikator kinerja. *Ketujuh*, indikator sasaran pada misi VII yang berjumlah 2 indikator kinerja dengan presentase pencapaian sasaran sebanyak 2 indikator atau 100%. *Kedelapan*, indikator sasaran pada misi VIII, terdiri atas 1 indikator kinerja dengan realisasi 1 indikator belum atau tidak mencapai sasaran.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 28 sasaran beserta indikatornya, pencapaian sasaran kinerja Pemerintah Kota Ambon di Tahun 2014 mengalami penurunan di banding tahun sebelumnya, dan masih terdapat beberapa indikator sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan yaitu

1. Peningkatan jangkauan layanan kesehatan, indikator yang masih kurang adalah kecamatan dengan puskesmas rawat inap, hanya mencapai 33,3%.
2. Tersedianya peraturan daerah yang mengatur pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dengan indikator perda tentang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, hanya mencapai 50%.
3. Terwujudnya penegakan dan pengembangan hukum secara adil dan bertanggung jawab, indikator yang perlu ditingkatkan adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum dengan capaian 66,6%.
4. Tersedianya sarana dan prasarana air bersih dengan indikator jumlah keluarga yang terlayani satuan sambungan air bersih hanya mencapai 59,18%.



Untuk mengatasi dan menyikapi permasalahan tersebut usaha yang dilakukan adalah antara lain :

1. Meningkatkan penganggaran pembangunan puskesmas rawat inap, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat pedesaan terhadap layanan kesehatan
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya penegakan hukum sehingga masyarakat merasa puas dengan kinerja aparat penegak hukum.
3. Pengorganisasian, yang dimaksudkan dengan pengorganisasian adalah untuk membantu setiap penyelenggara program/kegiatan mengetahui sumber-sumber apa yang diperlukan bagi terselenggaranya program/kegiatan yang direncanakan.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kota Ambon Tahun 2011-2016 khususnya untuk Tahun Anggaran 2014, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan atau dapat dicapai dengan baik. Namun perlu banyak penyempurnaan strategi di masa datang terutama dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah harus mengacu pada perkembangan lingkungan yang terjadi dan memperhatikan aspirasi masyarakat, sehingga program-program dan kegiatan yang ditetapkan dapat benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat.

Selanjutnya dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon tahun 2014 ini, kiranya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan di tahun berikutnya. Disadari bahwa penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini masih jauh dari



kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan di tahun mendatang sangat kami harapkan.